

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin hari bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara proporsional.

Beralihnya pola pemerintah sentralisasi pada masa orde baru ke pola pemerintahan desentralisasi di era reformasi ini telah melahirkan sejumlah konsep pembangunan yang arahnya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Selain alasan tersebut, karena beban pembangunan yang harus ditanggung oleh pemerintah sangatlah berat ditambah pula dengan kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan nasional tersebut, maka tidak mungkin pembangunan nasional hanya menggantungkan pada peran pemerintah saja, sehingga diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat baik secara individu maupun bagi mereka yang tergabung dalam sektor privat dan sektor organisasi non pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara adil dan merata, pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, yang berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang menyeluruh untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan yang demikian memerlukan adanya keselarasan dan kesatuan antar berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan adanya saling keterkaitan antara pembangunan yang satu dengan yang lain yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, hal ini memberikan arti bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa menurut Dirjen PMD (1996:4) bahwa:

“Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dari masyarakat”.

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan

semua pihak didalam proses pelaksanaannya, tanpa terkecuali, termasuk didalamnya seluruh masyarakat desa.

Agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, maka diperlukannya adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pelaksanaan pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1995 : 222): “Pembangunan itu meliputi segala kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara”.

Selanjutnya Tjokroamidjojo juga menegaskan bahwa ada 3 (tiga) hal penting yang mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipasi (1995:226):

1. Kepemimpinan : Peran kepemimpinan nasional dan kepemimpinan politik suatu bangsa menentukan terselenggaranya proses pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Komunikasi : Di dalam partisipasi terdapat komunikasi gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana yang hanya akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat melalui komunikasi.
3. Pendidikan : Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional.

Dengan demikian maka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ada di desa, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Sebagai administrator pemerintah, Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi di bidang administrasi desa, yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kelancaran jalannya roda pemerintahan. Sebagai administrator pembangunan, Kepala Desa melaksanakan proses pembangunan dan bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan sebagai administrator kemasyarakatan, Kepala Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk berfikir dan bertindak dengan mengutamakan pembangunan desa. Dengan demikian Kepala Desa harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian perhatian utama harus diberikan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tjokroamidjojo (1995:225) mengenai partisipasi adalah:

“Disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi”.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti tidak akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif sama sekali, malah sebaliknya akan banyak menemukan hambatan yang tidak diinginkan akan terjadi. Oleh karena itu partisipasi masyarakat harus digali seoptimal mungkin. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sudriamunawar (2006:54) yakni, “Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan”.

Di dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng, di dalam memberikan motivasi agar warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan,

diberikan dengan bentuk memberi arahan, binaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pembangunan desa bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih menunggu Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah untuk kegiatan pembangunan desa.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil, perlu sekali adanya partisipasi masyarakat sehingga hasil-hasil pembangunan dapat memberikan arti yang optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat merupakan suatu syarat dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut David Korten sebagaimana yang dikutip Supriatna (2000:209) bahwa: “Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam menerima program“. Namun dalam kenyataannya tumbuh dan meningkatnya partisipasi masyarakat masih belum seperti yang diharapkan, maka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti berketetapan memilih judul skripsi sebagai berikut **”Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

Dari rumusan masalah yang saya ambil disini kita dapat mengetahui apakah pemerintah yang dijalankan ini sudah dapat dilaksanakan sesuai fungsinya sebagai fasilitator dan administrator dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, atau malah sebaliknya yang justru hanya menjadi mesin birokrasi yang menyengsarakan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

D. Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi Praktis

- Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja para aparat pemerintah desa.

- Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai informasi, pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang bagaimana kinerja aparat desa, dimasa yang akan datang.
- Sebagai sumbangan pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kinerja aparat pemerintahan dalam pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat.

b. Kontribusi Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dalam pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat, khususnya pada Pemerintahan Desa.

c. Kontribusi Akademik

Merupakan satu persyaratan untuk mencapai kebulatan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi tulisan ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini diawali dengan latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sebagai penutup yaitu menguraikan sistematika pembahasan yang berisikan gambaran secara singkat tentang isi dari penulisan ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang didalamnya membahas landasan teoritis yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul dan tema yang diangkat oleh peneliti.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, mencakup materi yang terdiri dari, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi penyajian data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V: Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruhan disertai saran - saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasinya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.

1. Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1995:222) berpendapat “Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. Sedangkan menurut Siagian (2007:6) mengemukakan tentang pembangunan sebagai berikut:

“Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju kepada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National building*)”. Sedangkan definisi pembangunan menurut Sudriamunawar (2006:89):

“Bahwa pembangunan adalah merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara”.

Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian yaitu pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah pada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dari definisi di atas yang telah dikemukakan oleh beberapa ilmu maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses;
2. Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dalam suatu proses pembaharuan yang dilaksanakan secara continue;
3. Rangkaian pertumbuhan dan perubahan dilakukan dengan suatu rencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah;
4. Pembangunan yang dilaksanakan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai disini bersifat multidimensional yang mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan pada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tjokrowinoto sebagaimana yang dikutip oleh Suryono (2004:21) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif *diakronis* (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transendental*, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai *ideologi, the ideology of developmentalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
6. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Sehingga di dalam melaksanakan pembangunan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan demi kelancaran dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengolahan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan lebih efisien agar masyarakat nantinya dapat dilibatkan dalam menentukan visi (*wawasan*) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan sehingga program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu pemimpin yang bijaksana (*leadership*) karena berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin dan diharapkan agar seorang pemimpin dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Ketiga, yaitu partisipasi masyarakat (*people participation*), dalam rangka pelaksanaan pembangunan harus melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Karena pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan,

seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain, baru akan berhasil apabila di dalam pelaksanaannya ikut melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yaitu, organisasi-organisasi kemasyarakatan (community organization) seperti gotong royong pemufakatan, permusyawaratan dan lain-lain yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, perlu diperiksa sesama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari institusi itu dapat dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan nasional umumnya (Suryono, 2004:106)

2. Desa

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo dalam Sadu Wasistiono (2006:7) berpendapat bahwa “Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Mungtinghe, seorang Belanda anggota Raad van indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya

disebutkan tentang adanya desa-desa di saerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Pendapat lain menurut Soetardjo dalam Yuliati (2003:24) Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai dengan batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatra Sealatan, dati di Maluku, nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Menurut Bintarto sebagaimana yang dikutip oleh Sadu Wasistiono (2006:8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai:

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan

bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Namun demikian pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman dalam Sadu Wasistiono (2006:8) yang mendefinisikan desa :

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa: “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004)”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan adanya beberapa unsur desa antara lain:

1. Daerah dalam arti tanah-tanah yang produktif dan tidak produktif beserta pemanfaatannya, termasuk pula unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.
3. Tata kehidupan; dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

4. Pemerintah adalah unsur yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintah di desa.

Setelah menjelaskan pengertian dari kedua kata tersebut yaitu pembangunan dan desa, maka dapat dikemukakan pengertian pembangunan desa sebagaimana seperti yang dikutip oleh penulis berdasarkan dari pernyataan Adisasmita (2006:4) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam pembangunan desa terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia.
2. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkup pedesaan.
3. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa baik lahir maupun batin.
4. Partisipasi aktif masyarakat desa dengan memanfaatkan segenap potensi desa yang ada, disamping swadaya dan gotong royong.

Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa akan berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan desa sebenarnya telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan pada umumnya dan pelaksanaan pembangunan desa pada khususnya, dapat dilihat dari adanya tujuan dan sasaran pembangunan desa yang dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan. Pembangunan desa harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Menurut Adisasmita (2006:18), tujuan dan sasaran pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
- b. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisien dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- c. Tujuan pembangunan desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan

untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Namun pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan desa itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan, secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*). Sedangkan sasaran pembangunan desa meliputi:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas.
- b. Percepatan pertumbuhan desa.
- c. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
- e. Penguatan kelembagaan.

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan. Namun dalam kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan, hal ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumberdaya penting yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, akan tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi kekuatan nyata guna

memenuhi kebutuhannya sendiri. Desa tidak lagi mampu menjadi tempat hidup dan penghidupan yang layak bagi warga masyarakatnya, indikatornya ialah semakin banyaknya warga desa yang bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Oleh karena itu diharapkan agar tujuan dan sasaran ini dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dalam kaitannya dengan peningkatan pembangunan desa secara merata dan menyeluruh. Lebih lanjut menurut Adisasmita (2006:19), mengatakan bahwa pembangunan desa seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipatif.
3. Dapat dinikmati masyarakat.
4. Dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabilitas*).
5. Berkelanjutan (*sustainable*).

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan agar dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan secara merata dan menyeluruh. Sehingga dengan demikian ketahanan nasional akan bisa diwujudkan dengan memulai dari pembangunan desa.

4. Perkembangan Paradigma Pembangunan

Pada awalnya pembangunan nasional yang dilaksanakan di berbagai negara berkembang, pada dasarnya ditekankan pada pembangunan ekonomi, yaitu perubahan

ekonomi ke arah yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena hal yang paling terasa yang dapat dibandingkan antara negara maju dengan negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi. Didasarkan pada asumsi bahwa dengan melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, maka dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan di bidang yang lain. Namun sejalan dengan berkembangnya jaman, perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja sudah diakui tidak memberikan jaminan suatu proses pembangunan nasional akan dapat berjalan dengan stabil dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang adalah komitmen dan orientasi terhadap pembangunan bangsa dan negaranya. Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil mengenai landasan filsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program-program pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan paradigma pembangunan pada tahun 60-an menerapkan konsep pembangunan yang disebut paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yang menekankan peningkatan pendapatan masyarakat pertumbuhan pendapatan nasional. Pada paradigma ini pembangunan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan Gunnar Mirdal yang telah dikutip oleh Supriatna (2000:14), bahwa: “Untuk mengejar ketertinggalan pada negara berkembang digunakan konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), dengan ditandai pertumbuhan pendapatan nasional (GNP) yang didukung kebijaksanaan investasi, transfer teknologi,

dan perdagangan untuk industrialisasi”. Namun dalam kenyataannya dalam konsep paradigma pertumbuhan ini sasaran yang ingin dicapai kurang mengenai sasaran sebagaimana yang diharapkan, atau tidak menguntungkan sekelompok masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dudley Seers yang dikutip oleh Supriatna (2000:15) yang mengatakan bahwa: “Konsep paradigma pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi sasaran, oleh karena penerapan strategi pembangunan ekonomi pada negara berkembang mengabaikan masalah pemerataan baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembagian pendapatan”.

Penerapan konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan membuat semakin kuatnya ketergantungan negara berkembang pada negara maju, yang berupa pola konsumsi, investasi, bantuan luar negeri, dan pinjaman. Memang hasilnya dapat dirasakan, tetapi ternyata dapat dikhawatirkan terjadi pengurasan Sumber Daya Manusia yang mengancam kelangsungan pembangunan. Oleh karena itu pada tahun 70-an dan 80-an muncul konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan dan pemerataan (*growth equity*), dengan tujuan pemerataan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, berusaha, keamanan, kesejahteraan sosial maupun kelestarian lingkungan yang ditandai oleh struktur perubahan ekonomi dan sosial. Strategi didasarkan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi Sumber Daya Manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Model ini merupakan suatu langkah maju dalam memberikan pertimbangan pada aspek pembangunan sosial manusia jika dibandingkan dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan.

Kemudian pada tahun 80-an sampai 90-an dengan strategi dasawarsa pembangunan PBB ketiga sebagai tanda perbaikan sosial ekonomi di negara-negara

berkembang dengan sasaran utama yang menjadi perhatian serius adalah pertumbuhan pendidikan, urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, partisipasi, dan organisasi sosial atau politik, kerusakan lingkungan, dan masyarakat pedesaan.

Dalam dekade ini ditandai adanya masalah kependudukan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan alam akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi pada pembangunan nasional, sehingga sangat berpengaruh pada keadilan, kelangsungan, dan integritas pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian sebagai konsekuensi dari persoalan tersebut diterapkan konsep paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia atau *human development* dan juga konsep pembangunan bangsa (*nation building*) yang merupakan salah satu aspek dari konsep pembangunan multi dimensional sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja melainkan juga pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hubungan antar bangsa.

Di Indonesia sebagai negara berkembang menganut konsep pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh dan menempatkan manusia sebagai pribadi, makhluk sosial, dan religius, sehingga arah pembangunan kearah “Pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dengan mengusahakan pembangunan fisik dan non fisik serta kesejahteraan (Supriatna, 2000:17).

Konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan sistem nilai, gerakan, metode, strategi, dan indikator yang menjadi domain setiap negara berkembang. Pembangunan sebagai sebuah sistem mencakup komponen masukan, terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat; komponen proses, terdiri dari kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan

program-program pembangunan; dan komponen keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi, dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan sebagai gerakan mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa perspektif baru pembangunan tersebut memberikan peranan yang khusus pada kebijakan negara yang perlu dan harus dikembangkan adalah upaya untuk menumbuh kembangkan daya kreatif masyarakat itu sendiri agar membangun dirinya ke arah peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut menurut David Korten sebagaimana pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat ditingkat lokal;
- b. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan menurut daerahnya;
- c. Toleransi terhadap perbedaan;
- d. Proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek;
- e. Budaya kelembagaan yang ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi;

- f. Proses pembentukan Jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan LSM lokal, satuan organisasi tradisional mandiri;

Dari pendekatan diatas dapat dilihat bahwa program pembangunan jenis apapun yang dilaksanakan di desa, masyarakat diharapkan untuk ikut dan turut serta secara aktif, baik dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan bahkan monitoring dan evaluasi. Dengan pendekatan tersebut masyarakat akan merasa puas dan bertanggung jawab serta memperoleh perasaan memiliki program pembangunan tersebut, dan diharapkan agar pembangunan desa dapat berhasil apabila masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan tidak hanya bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara.

B. Konsep Dasar Partisipasi

1. Definisi Partisipasi

Definisi partisipasi banyak dikemukakan oleh berbagai ahli atau lembaga, namun belum ada satu kesepakatan secara pasti mengenai definisi partisipasi, sedangkan teori-teori yang dipergunakan pada umumnya langsung menyangkut kepada penerapannya atau aplikasinya. Sekalipun begitu disini penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa ahli tentang definisi partisipasi seperti yang dikutip oleh Sudriamunawar (2006:46):

1. Menurut Dirjen PDM Depdagri:
Partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.
2. Menurut Gordon Allport:
Partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja.
3. Menurut Keith Davis:

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab.

4. Menurut Santoso S. Hamidjojo:

Partisipasi berarti: a) turut memikul beban pembangunan, b) menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya, c) terwujudnya kreatifitas dan oto aktifitas.

5. Menurut Sutrisno Kutoyo:

Partisipasi adalah pengertian mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab pada organisasi yang bersangkutan.

6. Menurut Santoso Sastro Sastropetro:

Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk tujuan bersama.

7. Menurut Daryono, SH:

Partisipasi berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksplorasi sumber-sumber potensial dalam pembangunan.

8. Menurut Mubyarto:

Partisipasi adalah sebagai suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuannya tanpa mengorbankan kepentingan dirinya sendiri.

9. Menurut Departemen Pertahanan dan Keamanan RI:

Partisipasi adalah sebagai perwujudan sikap dan perilaku positif masyarakat dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar tanggung jawab bersama yang bersumber dari kesadaran.

10. Menurut Rahardjo Adisasmita:

Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal dan merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan).

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan definisi partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan atau kepentingan yang berorientasi untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Bahkan suatu program pembangunan yang tidak didukung

oleh partisipasi masyarakat akan tidak mempunyai arti apa-apa, artinya hasil pembangunan tersebut tidak akan bisa dinikmati dalam waktu yang lama bahkan lebih jatuh lagi hasil pembangunan itu tidak akan lestari karena tidak ada dukungan dari masyarakat setempat.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Sehingga dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

2. Bentuk dan Jenis Partisipasi

Menurut pendapat Adisasmita (2006:53) yang mengemukakan tentang berbagai bentuk dan jenis partisipasi yang telah berkembang adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam dunia usaha.
2. Partisipasi dalam bidang sosial ekonomi seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, angkutan dan jenis jasa-jasa lain.
3. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan seperti yang dilakukan LPM dan sebagainya.
4. Partisipasi karena dorongan batin untuk turut memikirkan permasalahan pembangunan, seperti yang dilakukan oleh media massa dan sebagainya.

5. Partisipasi kelompok profesional dan kelompok minat karena ingin menyumbangkan kemampuannya kepada masyarakat yang miskin, menderita, tertinggal dan terpencil seperti dilakukan oleh LSM.
6. Partisipasi yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat, seperti gotong royong, banjar desa, rembug desa, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Kaho (1997:114) bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan rumusan Dirjen PMD Depdagri (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen dalam Negeri), sebagaimana yang telah dikutip oleh Sudriamunawar (2006:51) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Partisipasi Buah Pikiran
Partisipasi disini memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok masyarakat itu turut serta menyumbangkan ide-ide bagi pembangunan masyarakat. Sebagai contoh nyata partisipasi buah pikiran dalam kehidupan di desa adalah kegiatan anjang sono, rapat desa, musyawarah desa yang dilaksanakan dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) maupun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
2. Partisipasi Tenaga dan Fisik
Partisipasi yang bersifat aktif yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat desa perkembangan partisipasi tenaga dan fisik ini tampak pada pekerjaan gotong royong dalam perbaikan jalan, jembatan rehabilitasi sarana ibadah, pendidikan dan sebagainya.
3. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran
Partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam bentuk kemahiran dan keterampilan yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan desanya. Contoh nyata dalam kehidupan masyarakat desa dapat kita lihat pada perayaan kemerdekaan negara kita, dimana masing-masing desa mengerahkan warga masyarakatnya yang memiliki kemampuan dalam seni untuk menghias dan menata desa dengan sebaik dan seindah mungkin. Mengirimkan warga

desa yang memiliki kemampuan dan prestasi dalam kegiatan lomba desa baik tingkat Kabupaten I Kotamadya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.

4. Partisipasi Harta Benda

Pertisipasi yang dilakukan warga masyarakat dalam bentuk sumbangan baik berupa barang maupun benda. Hal ini biasanya dilakukan seseorang bila dia tidak mampu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan di desa. Tidak bisanya untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di desa biasa disebabkan karena sudah uzur, sedang sakit, atau sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh dalam kehidupan masyarakat desa adalah seperti menyumbangkan makanan untuk masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti/gotong royong, memberikan sumbangan berupa makanan, minuman atau uang kepada yang melakukan ronda malam dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka disini penulis membatasi jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam mengemukakan pendapat dan pikiran

Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan pikiran dalam hubugannya dengan pembangunan desa diwujudkan dalam keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan sumbangan yang berupa pendapat dan pikiran yang berkaitan dengan pembangunan di desanya. Sumbangan pendapat atau pikiran ini dapat disalurkan melalui rapat atau musyawarah yang membahas tentang pembangunan desa. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang besar, maka hendaknya semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah pembahasan tentang pembangunan, sehingga seluruh aspirasi dan kehendak masyarakat dapat ditampung dan dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga nantinya program-program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dan menyentuh kepentingan-kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pembangunan desa, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka, partisipasi tenaga kerja yang ada di desa disadari dengan semangat gotong royong yang telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Untuk melestarikan semangat kerja seperti ini, maka sifat dan semangat gotong royong harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Partisipasi dalam bentuk skill atau keahlian

Partisipasi dalam bentuk skill atau keahlian ini diwujudkan dengan memberikan sumbangan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat desa hubungannya dengan pembangunan desa. Warga desa yang memiliki kemampuan pada bidang tertentu dapat menyumbangkan keahliannya dalam kegiatan pembangunan di desanya, seperti misalnya warga yang memiliki kemampuan di bidang pertukangan. Sumbangan kemampuan mereka ini sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dengan dibantu oleh warga desa yang lain.

4. Partisipasi dalam bentuk sumbangan atau materiil

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk materi yang merupakan sumbangan dari semua warga desa. Sebagai contoh, misalnya di suatu desa akan dilaksanakan pembangunan fisik misalkan saja pembangunan jembatan, maka warga dapat memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka, sumbangan seperti ini dapat berupa sumbangan uang, sumbangan bahan bangunan, sumbangan makanan, dan lain-lain. Sumbangan yang dimaksud di

sini bersifat sukarela tidak memaksa, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga desa.

5. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Seluruh warga desa harus dilibatkan keikutsertaannya dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya, tanpa kecuali. Pembangunan di sini mencakup pembangunan fisik dan non fisik yang ada di desa. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan fasilitas –fasilitas yang ada di desa, sedangkan pembangunan non fisik dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dengan cara salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh warga.

6. Partisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan

Wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi ini yaitu diharapkan masyarakat ikut menjaga dan memelihara semua hasil pembangunan di desanya dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua hasil pembangunan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh semua warga desa, dan diharapkan tidak dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

7. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan

Dalam partisipasi ini, masyarakat diberikan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan, namun hendaknya di dalam memberikan penilaian disertai dengan pendapat mereka untuk masukan perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih baik dari sebelumnya.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut (Sastropetro, 1986:76) ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan di desanya, antara lain:

1. Sistem nilai budaya masyarakat desa

Menurut pendapat (Sastropetro, 1986:76): “keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa dikemukakan adanya sistem dan nilai budaya untuk saling tolong menolong diantara sesama masyarakat yang demikian melekat di hati masyarakat desa yaitu apa yang lebih dikenal dengan gotong-royong”. Sistem nilai ini pada awalnya masih berada dalam lingkup keluarga dalam aspek tertentu saja, misalnya dalam membuka kebun atau ladang baru, membangun rumah baru, membuka jalan baru yang merupakan sisi aktivitas pembangunan masyarakat desa disamping urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah keadaan seperti pengangkatan kepala desa, perkawinan, kematian, kelahiran, dan sebagainya. Nilai-nilai budaya yang melekat ini terus terbawa di era pembangunan sekarang ini dan wujud gotong-royong diarahkan ke segi-segi positif terutama dalam berbagai aspek dalam pembangunan fisik. Sistem nilai budaya yang positif ini untuk terus dipelihara serta ditingkatkan guna menggalakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

2. Pendidikan

Tingkat partisipasi masyarakat juga akan dipengaruhi tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat desa. Menurut (Sastropetro, 1986, h.76): “makin baik tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat desa akan semakin baik dalam memahami berbagai program atau perencanaan pembangunan yang hendak

dilakukan pemerintah di daerah”. Dengan kemudahan pemahaman terhadap berbagai program pemerintah tersebut, maka partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan tersebut akan dapat bervariasi dan tidak hanya partisipasi tenaga saja.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka faktor pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan. Kualitas partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa memang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diperoleh, oleh karena itu untuk menangani pembangunan dibutuhkan manusia-manusia yang cerdas, terdidik, terampil, dan mempunyai semangat dan keuletan yang tangguh untuk menghadapi setiap tantangan pembangunan didesanya. Untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, maka perhatian terhadap upaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat pedesaan adalah sangat diperlukan, minimal rakyat pedesaan dapat bebas dari buta huruf dan buta aksara yang saat ini sudah mulai diberantas melalui program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

3. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan juga merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Menurut pendapat (Sastropetro, 1986, h.76): adalah: “Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa”. Model kepemimpinan yang dimaksud dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

a. Tipe pemimpin yang otokratis

Tipe ini dalam pelaksanaannya cenderung bertindak sesuai dengan kehendak dari seorang pemimpin, seorang pemimpin menganggap organisasi milik pribadi, sehingga mengidentikkan tujuan yang ingin dicapai dengan tujuan organisasi. Dalam tipe kepemimpinan ini bawahan dianggap sebagai alat dari seorang pemimpin dalam usaha mencapai tujuan, masyarakat/pihak yang dipimpin tidak diberikan kesempatan untuk memberikan partisipasi pendapat/pikiran karena pemimpin hanya mau menjalankan apa yang dikehendaknya tanpa banyak memperhatikan suara atau pendapat yang dipimpinnya. Keterlibatan masyarakat dalam kaitan dengan pola kepemimpinan ini cenderung dilatar belakangi oleh adanya paksaan dari seorang pemimpin dan bukan datang dari inisiatif/kehendak masyarakat.

b. Tipe pemimpin yang militeristis

Tipe ini hampir sama dengan tipe kepemimpinan otokratis, dimana hubungan antara seorang pemimpin dan yang dipimpin lebih banyak bersikap perintah. Dengan tipe kepemimpinan seperti ini inisiatif partisipasi dari bawahan bersifat pasif dan menunggu komando saja. Di dalam menggerakkan bawahannya, seorang pemimpin dalam tipe kepemimpinan ini, selalu bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Sama seperti dengan tipe pemimpin otokratis, dalam tipe kepemimpinan ini juga sulit untuk menerima kritikan dari bawahannya. Semua perintah berasal dari pemimpin, dan seorang

bawahan hanya sebatas melaksanakan perintah tersebut dengan disiplin yang tinggi, sehingga saran dan pendapat dari bawahannya tidak diperlukan.

c. Tipe kepemimpinan demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis di dalam menggerakkan bawahannya selalu bertitik tolak dari pendapat manusia adalah makhluk yang mulia di dunia, sehingga perlu adanya usaha untuk menghargai dan menghormati hak dan kebebasan dari bawahannya untuk berpendapat dan menyumbangkan partisipasinya terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Didalam usaha untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama, selalu mengutamakan kerjasama dan tim kerja, baik antara atasan dan bawahan maupun antara bawahan dan bawahan. Didalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua bawahannya untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya demi kesuksesan bawahan.

d. Tipe pemimpin yang paternalistik

Dalam tipe kepemimpinan ini, semua bawahan selalu dianggap sebagai manusia yang tidak dewasa, sehingga selalu bersikap terlalu melindungi, selalu mengatur dalam setiap tugas yang diperintahkannya, tanpa memberi kesempatan kepada bawahannya untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan saran, pendapat, atau pikiran untuk mengambil keputusan. Inisiatif selalu datang dari pemimpin, tanpa memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif, daya kreasi dan fantasinya. Seorang pemimpin dalam tipe ini selalu merasa bahwa dirinya yang selalu benar, merasa dirinya lebih pintar dan mengerti daripada bawahannya.

e. Tipe kepemimpinan yang kharismatik

Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin dihormati dan disegani bukan karena jabatan formal atau kekuasaan yang dimilikinya, tetapi cenderung pada kharisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang mempunyai kharisma mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa masih menjadi pengikut pemimpin itu.

Untuk menumbuhkan dan menyuburkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting. Penerapan pola kepemimpinan yang tepat akan mempengaruhi pula partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desanya. Oleh karena itu menjabat sebagai pemimpin di desa sangat tepat kalau dipilih oleh rakyat sendiri, dengan sistem demikian, hasilnya akan selaras dengan inspirasi dan kehendak masyarakat itu sendiri yang menghendaki hak dan suara rakyat dalam setiap kegiatan dan rencana pembangunan di desanya.

4. Komunikasi

Faktor ini merupakan salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembanguana, karena gagasan-gagasan kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan kemudian dimengerti oleh masyarakat desa, karena hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan masyarakat dan inspirasi masyarakat.

Komunikasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan carayang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak. Fungsi utama dari komunikasi pembangunan adalah memberikan informasi dari satu pihak kepihak lainnya, informasi yang dimaksud dapat beraneka ragam dan bermacam-macam tergantung dari kehendak sumber informasi untuk memberikan pesan kepada penerima informasi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, maka masyarakat desa merupakan pihak penerima informasi, sedangkan pemerintah merupakan pemberi informasi. Pemerintah sebagai pemberi informasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat harus dapat dipahami oleh masyarakat secara mengena terutama pesan-pesan pembangunan sehingga partisipasi masyarakat akan tergugah untuk berpartisipasi diseluruh kegiatan pembangunan yang tengah berlangsung.

4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, perencanaan yang terperinci dan kegiatan-kegiatan yang nyata dan efektif, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dari masyarakat dan melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri ialah terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat semakin terbuka dan makin tinggi kesadarannya, serta semakin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dengan kata lain keberhasilan

penyelenggaraan pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna.

C. Kepala Desa Dalam Organisasi Pemerintahan

1. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati / Walikota atas nama Gubernur. Kepala Desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Dalam Undang- undang No 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa syarat – syarat untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan di kenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang di atur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut, Widjaja (2003, h.126) dalam melaksanakan fungsinya kepala desa mempunyai kedudukan, tugas, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Kedudukan: sebagai pemimpin dan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
- b. Tugas dan Kewajiban: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa, mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya, mengajukan Rancangan Peraturan Desa bersama BPD/BPM menetapkan sebagai Peraturan Desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang ada berkembang di Desa yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Adisasmita (2006:124) menyebutkan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

Tugas Kepala Desa:

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
- b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong yang masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Fungsi Kepala Desa:

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah desa.
- d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Melaksanakan koordinasi jalannya pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seorang kepala desa memiliki jalur kepemimpinan dan manajemen ke beberapa arah, antara lain:

1. Jalur ke atas, yaitu jalur pemerintah dan laporan dari dan ke Kecamatan.
2. Jalur ke luar, yaitu konsultasi dan kerjasama dengan desa-desa lain.
3. Jalur ke samping, yaitu jalur koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, dimana seorang kepala desa memegang peran koordinatif.
4. Jalur ke bawah, yaitu jalur pelayanan terhadap masyarakat desa.
5. Jalur ke dalam, yaitu jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur staf pelaksana.

Dengan adanya jalur kepemimpinan dan manajemen seperti diatas, maka pelaksanaan tugas dari seorang kepala desa dapat terkoordiner dan dapat terlaksana secara sistematis. Dari kejelasan jalur kepemimpinan tersebut, maka akan dapat meminimalisir ketimpangan ataupun *Misscommunication* dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Desa.

Dari penjelasan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka jelas bagi kita bahwa tugas dan kewajiban yang diemban oleh Kepala Desa sangatlah kompleks, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa guna pencapaian kesejahteraan masyarakat. Selain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Rumah Tangga Daerah, seorang Kepala Desa harus mampu mendorong atau menggerakkan masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

2. Kedudukan Kepala Desa Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto No.72 Tahun 2005 yang dimaksud dengan Desa adalah: “Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 202 dijelaskan bahwa “Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Kepala Desa dalam struktur organisasi pemerintahan Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan terendah langsung di bawah Camat yang mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari struktur organisasi pemerintah desa, maka kedudukan Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan

tertinggi dalam tingkatan yang terendah dan terbatas tetapi mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat, pemimpin dalam hal ini seorang Kepala Desa berperan sebagai administrator memiliki peran yang sangat penting. Kepala Desa selain sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan juga sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau sebutan lain yang menampung segala aspirasi dari warga masyarakat. Dengan demikian ada atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan desa akan banyak tergantung kepada kemampuan pemimpin/ Kepala Desa dalam mengambil keputusannya, khususnya keputusan yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan di desanya masing-masing.

3. Upaya Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Upaya pemimpin dalam hal ini Kepala Desa memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, karena faktor seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan pembangunan,

apabila Kepala Desa turut hadir dan bekerja sama pada setiap kegiatan pembangunan di desanya.

Dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desa terdapat tiga unsur pelaksanaannya yaitu: Kepala Desa beserta dengan perangkat desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain, dan masyarakat. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya. Dalam hal pelaksanaannya, peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan penunjang utama setiap program pembangunan desa tersebut. Sedangkan LKMD merupakan wadah aspirasi dan aktivitas segenap lapisan masyarakat di setiap desa.

Masyarakat Desa mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini bukan saja karena masyarakat desa merupakan penghasil sebagian pendapatan nasional, dimana di daerah pedesaan terdapat sumber-sumber ekonomi baik sumber-sumber alam maupun sumber-sumber manusia, akan tetapi ditinjau dari corak kehidupan di desa yang didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat dan memiliki unsur gotong royong yang kuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara-cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistimatis (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2006: hal 42). Penelitian adalah usaha untuk menemukan atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian adalah prosedur, cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menghimpun atau mengumpulkan data-data untuk dapat diperiksa dan diuji kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis penelitian yang dipakai, agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian tersebut. Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010:7) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian”.

Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Hadari Nawawi (2003:67) “Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek-subyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya”. Selanjutnya metode penelitian deskripsi ini sering disertai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada (masalah-masalah aktual)
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang akan mendukung dalam memperoleh data. Adapun unit informan yang akan memberikan informasi kepada peneliti yaitu kepala desa, sekretaris desa, staf desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, dan unsur RT/RW yang dianggap relevan dalam arti tepat untuk dijadikan sumber data utama yang diperlukan.

Dari Pengertian tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah peneliti berusaha menggambarkan, menjelaskan dan mengidentifikasi secara jelas dan terperinci tentang Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang,

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian dari apa yang hendak diteliti sehinggamemudahkan peneliti dalam menentukan batasan untuk mencari data yang ada di lapangan agar suatu masalah maupun obyek yang diteliti tidak melebar dan terlalu

luas. Fokus penelitian juga ditujukan supaya penelitian ini bisa terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - a. Memberikan Motivasi
 - b. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi
 - c. Melaksanakan Tugas Pengawasan
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengawasan
 - d. Evaluasi
 - e. Memelihara Hasil-hasil Pembangunan Desa
3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. Kendala Internal
 - b. Kendala Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah Wilayah Desa

Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Situs dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang diperoleh dari para sumber tersebut dan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian di lapangan. Sesuai dengan jenisnya data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi:

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data yang utama tanpa adanya perantara. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data primernya keterangan langsung dari:

- a. Kepala Desa Bareng Kabupaten Jombang
- b. Perangkat Desa Bareng Kabupaten Jombang.
- c. Masyarakat Desa Bareng Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti. Data sekunder penulis diperoleh dari dokumen-dokumen dari hasil Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bareng Kabupaten Jombang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada nara sumber yaitu Kepala Desa, Staf/karyawan Desa, Masyarakat. Dalam proses wawancara peneliti membuat kerangka dan garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses tanya jawab.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian. Dengan cara teknik pengumpulan data dan mempelajari berbagai bahan-bahan tertulis seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari:

a. Peneliti sendiri

Peneliti melakukan sendiri dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berisi pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan oleh peneliti untuk menanyakan sejumlah informasi kepada nara sumber yang berkaitan dengan obyek dalam penelitian.

c. Catatan lapangan

Catatan lapangan yang berisi tentang berbagai informasi dan data yang diperoleh peneliti dari tempat penelitian atau lokasi penelitian saat observasi dilakukan.

G. Analisis Data

Analisa data pada dasarnya merupakan pengolahan data dari suatu hasil pengamatan atau pengukuran data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1994) analisa data kualitatif terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan peneliti sejak awal melakukan penelitian, dengan cara data dikumpulkan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sampai peneliti merasa cukup akan data yang dibutuhkan.

b. Reduksi data

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan pada penyederhanaan pengabstrakan, transformasi dan meringkas data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data ini terus dilakukan sampai sesudah penelitian lapangan dilakukan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

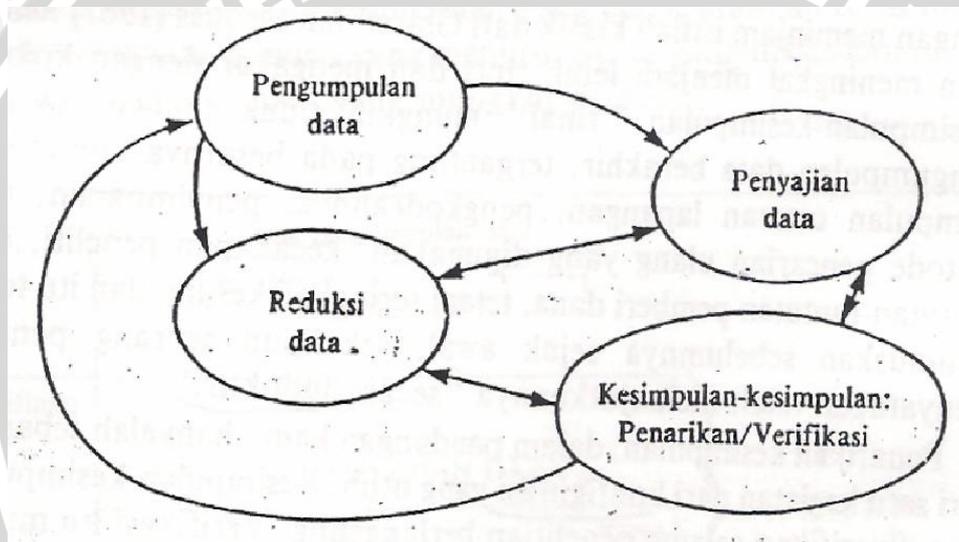
c. Penyajian data

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, kemudian dapat dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan.



Gambar 3.1 Bagan Analisa Data Kualitatif

Sumber: Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (1994)

Dengan melihat data di atas model ilustrasi dari menganalisis dan pengumpulan data melalui model interaktif yang berisikan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan. Sesuai dengan diagram model interaktif tersebut, maka analisis data kualitatif merupakan cara penelitian yang berlanjut, berulang, dan dilakukan terus-menerus oleh peneliti. Peneliti akan menyusun segala peristiwa melalui pengumpulan data yang kemudian diikuti dengan reduksi data. Reduksi data dan penyajian data ini disusun pada

waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah penyajian data berakhir peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan catatan di lapangan. Apabila catatan tersebut dianggap belum cukup atau tidak didapatkan, peneliti wajib mencari kelengkapan data di lapangan secara terus-menerus. Sebelum meninggalkan lapangan, peneliti secara teliti harus membaca terlebih dahulu hasil pengumpulan data dan reduksi data. Kalau dianggap belum cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Bareng

a. Letak Geografis

Desa Bareng bila ditinjau dari sisi geografis mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa bila mempunyai ketrampilan yang memadai. Namun hal tersebut belum dikelola secara maksimal dikarenakan terhambat oleh kurangnya pengetahuan yang memadai. Sehingga hal ini menimbulkan kantong-kantong kemiskinan yang hampir tersebar merata ditiap dukuh atau dusun. Hanya umumnya yang berpenghasilan layak adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai pemerintah.

Desa Bareng merupakan ibukota wilayah Kecamatan Bareng yang mempunyai luas wilayah 966.324 hektar. Yaitu Wilayah Pemukiman 61.500 Ha, Sawah 584.27 Ha dan Tegalan 415.36 Ha. Penggunaan lahan Desa Bareng sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian sawah, untuk musim hujan ditanami padi sedangkan pada musim kemarau ditanami kedelai dan polowijo. Sedangkan secara administrasi batas-batas wilayah Desa Bareng adalah:

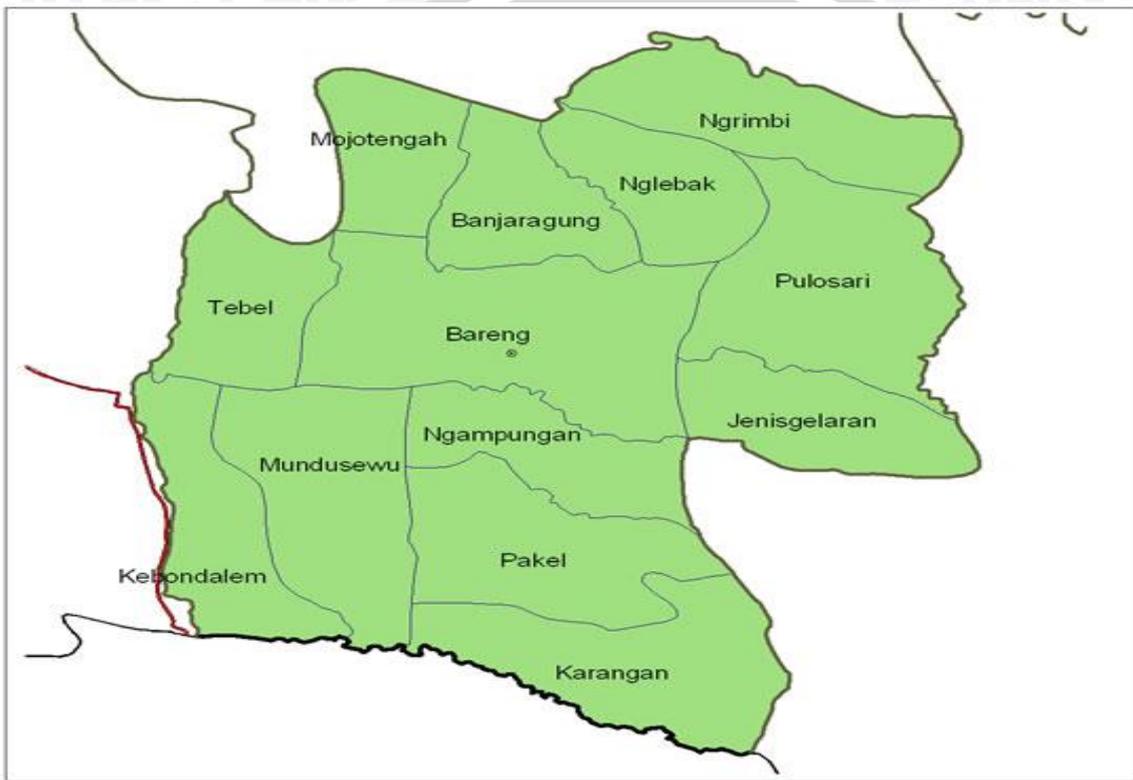
Sebelah Utara: Desa Bareng Kec. Bareng

Sebelah Selatan: Desa Ngampungan Kec. Bareng

Sebelah Timur: Desa Jenis Gelaran Kec. Bareng

Sebelah Barat: Desa Tebel dan Desa Mojotengah Kec. Barend

Dengan penjelasan batas-batas wilayah seperti di atas yang terletak disebelah Desa Barend dapat dijelaskan kembali dengan bentuk peta sebagai berikut:



Gambar 4.1: Peta Kecamatan Barend
(sumber: web Pemerintahan Kab. Jombang)

Dengan demikian secara geografis dapat dilihat bahwa Desa Barend merupakan ibu kota wilayah Kecamatan Barend. Mengenai kondisi iklim wilayah Desa Barend sangat dipengaruhi oleh faktor hujan atau dapat disebut dengan tadah batok (tadah hujan). Sedangkan kondisi topografi wilayah Desa Barend sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian wilayah pada kisaran 0-400 m diatas permukaan air laut. Secara geologis wilayah Desa Barend jenis tanahnya didominasi oleh regosol coklat keabu-abuan, lotosal coklat kemerahan dan alowial kelabu. Dengan demikian penggunaan lahan didominasi oleh sawah, pekarangan, tegalan/kebun dan hutan.

2. Keadaan Demografis

Desa Bareng merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bareng yang jumlah penduduknya 10.669 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 5.339 jiwa dan perempuan 5.330 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 2.908 KK dengan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh tani.

Tabel 4.1

Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur Di Desa Bareng Pada Bulan November 2010

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Prosentase
1.	0 – 14	430 jiwa	11,2 %
2.	15 -29	1200 jiwa	31,33%
3.	30 – 59	1800 jiwa	46,99%
4.	60 th keatas	400 jiwa	10,44%

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Bareng

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa perbandingan kelompok penduduk antara usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif. Usia produktif memiliki prosentase yang paling besar dibandingkan dengan prosentase usia yang lain. Usia belum produktif adalah usia yang berada di bawah 15 tahun, sedangkan usia produktif adalah usia lebih dari 15 tahun sampai dengan usia 60 tahun, dan golongan usia tua yang tidak produktif adalah mulai dari 60 tahun ke atas.

Kondisi seperti ini merupakan potensi yang besar dalam pembangunan, karena dengan memiliki prosentase kelompok penduduk usia produktif yang besar, hal ini merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat penting yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan desa, baik itu berupa sumbangan tenaga, pikiran maupun material

yang kesemuanya itu akan memperlancar suksesnya pembangunan. Potensi yang besar itu akan dimanfaatkan secara optimal, jika terdapat kesadaran diri dari masing-masing individu tersebut untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desanya. Setiap individu seharusnya sadar akan pentingnya pembangunan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan demi terwujudnya kesejahteraan bersama, karena hakekat dari pembangunan itu sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, jadi dapat kita lihat bahwa hasil dari pembangunan nantinya akan dinikmati oleh rakyat itu sendiri, oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Bareng Pada Bulan November 2010

No	Sarana Pendidikan	Gedung	Kondisi
1.	Taman kanak-kanak	2 Buah	Baik
2.	SD/MI	5 Buah	Kurang Baik
3.	SLTP/MTS	3 Buah	Baik
4.	SLTA/MA	1 Buah	Baik
5.	Universitas/Sekolah Tinggi	-	-

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Bareng

Desa Bareng memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, yaitu memiliki gedung TK, Sekolah Dasar, SLTP, dan SLTA, hanya saja kondisi salah satu gedung SD masih dalam keadaan rusak. Hal ini sangat disayangkan karena dengan terbatasnya sarana dan prasarana maka akan dapat menghambat kemajuan dan pertumbuhan pendidikan yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan

kualitas pendidikan di Desa Bareng, dan juga diperlukan perhatian yang khusus dari Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, yakni berupa pembangunan fisik gedung-gedung sekolah.

Apabila dikaitkan dengan kontribusinya terhadap pembangunan, tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat partisipasi yang akan diberikan terhadap pembangunan. Jadi, apabila tingkat pendidikan masyarakat pada suatu desa baik atau tinggi, maka pemahaman terhadap berbagai program atau perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut akan semakin baik pula, jika dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pemahaman akan program-program pembangunan yang baik akan memudahkan pencapaian partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka faktor pendidikan masyarakat perlu di tingkatkan.

Selanjutnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Desa Bareng Berdasarkan Agama Pada Bulan November 2010

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Prosentase
1.	Islam	3310	97,92%
2.	Kristen	520	15,38 %
3.	Katolik	-	
4.	Hindu	-	
5.	Budha	-	

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Bareng

Dilihat dari data tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa kelompok agama yang ada di Desa Bareng ada 2 (dua) agama, yaitu Islam dan Kristen. Hampir sebagian besar penduduk Desa Bareng menganut agama Islam, ini ditunjukkan pada tabel diatas, agama Islam memiliki prosentase 97,92% jiwa, sedangkan jumlah pemeluk agama Kristen memiliki prosentase 15,38% jiwa. Akan tetapi kerukunan beragama di Desa Bareng sangat didukung oleh kesadaran warganya yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama, masing-masing pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan baik serta peran tokoh agama yang ikut membantu terwujudnya kerukunan agama tersebut.

Berkenaan dengan aktifitas beragama yang dilaksanakan oleh penduduk Desa Bareng, di desa tersebut telah didukung dengan tersedianya prasarana peribadatan. Untuk mengetahui prasarana peribadatan yang tersedia di Desa Bareng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Prasarana Peribadatan Di Desa Bareng Pada Bulan November 2010

No	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	3 Buah
2.	Langgar/Surau	12 Buah
3.	Gereja	1 Buah
4.	Vihara	-
5.	Pura	-

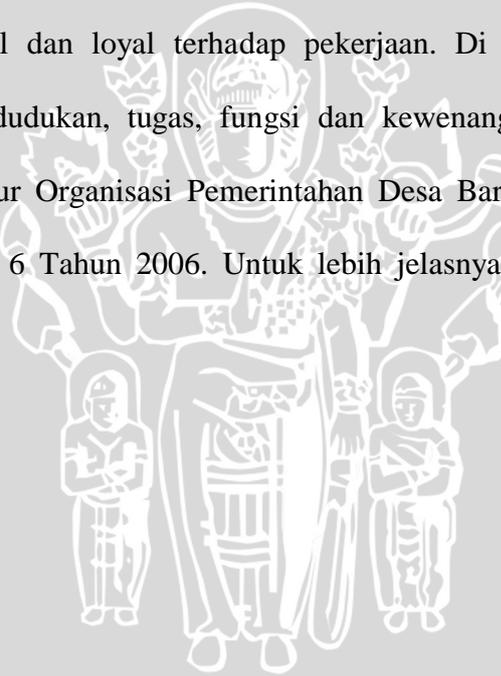
Sumber Data: Monografi Kantor Desa Bareng

Berdasarkan tabel diatas, jumlah prasarana peribadatan yang tersedia di Desa Bareng sudah cukup memadai, dengan memiliki 3 buah masji, 12 buah langgar, dan 1

gereja. Tersedianya prasarana peribadatan tersebut memberi kemudahan kepada penduduk Desa Bareng dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Bareng melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Tercapainya kesejahteraan ke arah yang diharapkan akan dapat terwujud apabila tugas, fungsi dan kewenangan tersebut diserahkan kepada orang-orang yang cakap, bertanggung jawab, terampil dan loyal terhadap pekerjaan. Di samping itu untuk mengetahui secara jelas kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak maka dibentuk Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bareng menurut Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :





Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2006 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bareng terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 5 Staf Urusan yaitu Staf Urusan Pemerintahan, Staf Urusan Umum, Staf Urusan Kesra, Staf Urusan Pembangunan, Staf Urusan Keuangan. Selain itu ada 8 orang Kasun (Kepala Dusun) yaitu Kasun Bareng, Kasun Mojounggul, Kasun Kuwik, Kasun Kembang Tanjung, Kasun Kedungpring, Kasun Banjarsari, Kasun Kedunggalih, Kasun Tegalrejo.

Dengan adanya Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, maka akan memudahkan dalam pembagian tugas yang akan dibagikan kepada Perangkat Desa, dengan begitu setiap Perangkat Desa akan mengerti tentang kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing. Sedangkan BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Sedangkan sebagai koordinator program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng, dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang merupakan mitra kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan di Desa. Fungsi LKMD dalam proses pembangunan yang ada di Desa Bareng adalah sebagai wadah formal partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengkoordinir program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng dalam bentuk program-program pembangunan bukan pada pelaksanaan pembangunan fisik Desa saja.

4. Visi Misi Pembangunan Desa

1. Visi

Visi Merupakan pandangan Jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, harus dibawa dan berkarya agar konsisten, dapat eksis, antisipatif, inofatif, serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai yang luhur yang dianutkan oleh seluruh komponen stakeholders. Berpihak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang. Maka visi Desa Bareng adalah: **“Menuju Bareng yang Transparan, Bermanfaat, Demokratis, Agamis dan Sejahtera”**.

Penjelasan Visi:

Dalam rumusan Visi Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat dimana dengan kemampuan dan kompetensinya, dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi Kebutuhan Sandang, Pangan, Papan. Kesejahteraan itu sendiri merupakan cita-cita kebutuhan masyarakat yang merupakan tanggungjawab stakeholder/pelaku pembangunan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi Titik Kritis adalah pemberdayaan peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

➤ Agamis, adalah suatu kondisi dimana agama berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam aktifitas masyarakat, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis, serta dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat akan budaya leluhur dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.

- Demokratif, adalah suatu kondisi keadilan dalam memperjuangkan hak dan kewajiban masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai mufakat, tanpa mementingkan kepentingan golongan/kelompok atau pribadi.
- Transparan, adalah suatu tindakan atau implementasi dari suatu kebijakan yang dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- Bermanfaat, adalah suatu hasil kegiatan yang bisa merubah taraf hidup/ kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

2. Misi

Misi adalah gambaran umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara Pemerintah Desa tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintahan Desa Bareng adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Maksud dari mewujudkan Pemerintahan yang baik yaitu penyempurnaan struktur kelembagaan Pemerintahan Desa yang menitikberatkan pada proses penguatan kelembagaan/ organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang profesional, efektif, berkopetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Masyarakat Desa.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Maksud dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia disini yaitu mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa dan swasta agar pembangunan di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, mempunyai integrasi dan jati diri yang dipandu oleh nilai-nilai yang luhur berbudaya dan beragama.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan perdagangan

Maksud dari pengertian diatas yaitu mengembangkan desa dengan memperkuat perekonomian Desa yang mengandalkan pada kekuatan sektor pertanian dan produksi unggulan desa menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi dan pelayanan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan pada perekonomian kerakyatan serta mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan.

4. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Maksud dari pengertian diatas yaitu pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada dapat dirasakan secara merata dari hasilnya oleh semua masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitar.

5. Pengembangan Demokrasi dan Transparan di segala bidang

Maksud dari pengertian diatas yaitu pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya merupakan keinginan dari pemerintah desa akan tetapi merupakan keinginan masyarakat yang terbukti dalam pengambilan kebijakan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan bisa dipertanggungjawabkan.

B. Penyajian Data Fokus

1. Upaya Kepala Desa Bareng Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Upaya Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan memegang peranan yang sangat penting, karena seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa mempunyai tanggung jawab di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di Desanya. Tanggung jawab di bidang pembangunan yang dimaksud disini yaitu, Seorang Kepala Desa harus mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya, dengan cara memberikan arahan dan dorongan kepada masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah desa tersebut.

Dalam usaha menggerakkan dan mengarahkan masyarakat desanya agar ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan, maka seorang Kepala Desa harus mampu memahami benar masyarakatnya. Tiap Desa mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, walaupun begitu pada umumnya masyarakat desa mempunyai hubungan kekeluargaan dibanding dengan berdasarkan kekuasaan formal. Di sini seorang Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya bertindak sebagai penguasa atau pemberi perintah tetapi lebih dari itu dia harus dapat dicontoh, baik ucapan maupun tindakan konsekuensinya. Masyarakat desa pada umumnya masih tergantung kepada Kepala Desanya untuk memimpin mereka dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan di desanya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada upaya untuk menyukseskan kegiatan pembangunan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar masyarakat desa tergantung pada kepemimpinan Kepala Desa dalam hal untuk menumbuhkan partisipasi mereka dalam

kegiatan pembangunan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan partisipasi tersebut, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tulisan sebagai berikut :

a. Memberikan Motivasi

Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Diantaranya dengan cara pemberian motivasi secara sosial, fisiologis dan pemberian semangat dalam bentuk lomba. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng, di dalam memberikan motivasi agar warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, diberikan dengan bentuk memberi arahan, binaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pembangunan desa bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Pemberi dukungan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai perlombaan ditingkat desa, kecamatan, maupun tingkat nasional, dan juga kehadiran dan keikutsertaan Kepala Desa dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya.

Pemberian motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng melalui pemberian penjelasan dan penyuluhan tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, dilakukan melalui sebuah rapat atau musyawarah dengan mengundang beberapa perwakilan desa seperti, masing-masing ketua RT/RW, LKMD, BPD, perangkat desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, biasanya undangan tersebut

melalui undangan tertulis yang dibuat oleh Kepala Desa dan dilakukan di Kantor Desa Bareng. Rapat desa ini hanya akan dilakukan apabila akan ada pembangunan di desa, jadi tidak selalu dilakukan rutin tiap bulan. Di dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan RT akan memberikan informasi mengenai pembangunan apa yang perlu dilaksanakan di wilayah lingkungan RT tersebut, yang kemudian akan dimusyawarahkan mengenai prioritas pembangunan yang perlu untuk diutamakan terlebih dahulu. Rapat desa tersebut juga membahas tentang program-program pembangunan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang disampaikan oleh Kepala Desa. Di samping itu, pemberian motivasi berupa pemberian arahan dan penyuluhan tentang program-program pembangunan, juga diberikan secara langsung oleh Kepala Desa Bareng kepada masyarakatnya, hal ini dilakukan melalui interaksi langsung antara Kepala Desa dengan semua elemen masyarakat desa melalui sebuah musyawarah desa yang disebut dengan rembug desa. Rembug desa ini biasanya dilakukan dua kali dalam setahun dengan membahas program-program pembangunan yang akan dilakukan di Desa Bareng dengan pemberian arahan dan penyuluhan tentang program tersebut, dan juga mengevaluasi kinerja Kepala Desa beserta dengan perangkatnya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Muchtar selaku Sekretaris Desa Bareng yang mengatakan bahwa :

“Bapak Kepala Desa, selalu memberikan arahan dan petunjuk bagaimana cara untuk membangun desa ini. Biasanya hal ini diupayakan oleh beliau melalui rapat rutin tiap bulan dengan mengundang perwakilan desa seperti: masing-masing ketua RT/RW, LKMD, BPD, tokoh-tokoh masyarakat dan juga perangkat desa untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan desa dimana pembangunan termasuk di dalamnya, dan bila dirasa perlu beliau juga akan mengundang seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah desa yang disebut dengan rembug desa. Rembug desa ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun atau pada akhir tahun yang pertama untuk membahas perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang yang perlu untuk dilaksanakan, dan yang kedua untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa beserta dengan perangkatnya”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bareng, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2013, jam 10.00 WIB).

Adapun motivasi secara fisiologis yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng yang lebih ditekankan dalam bentuk pemberian makanan dan minuman pada saat kegiatan pembangunan berlangsung. Pemberian makanan dan minuman ini dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak ikut bekerja, dan biasanya dikoordinir oleh Bapak Kepala Desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali selaku Warga Masyarakat Desa Bareng yang mengatakan bahwa :

“Pada saat diadakan kegiatan pembangunan desa selalu disediakan makanan dan minuman bagi warga yang bekerja, menurut saya hal ini dapat membangkitkan semangat warga untuk lebih giat lagi dalam bekerja, selain itu semangat warga menjadi bertambah dengan hadirnya Kepala Desa di lokasi gotong royong dan kadang-kadang jika pekerjaan itu tidak terlalu berat maka beliau juga akan ikut bekerja bersama warganya”.

(Wawancara dilakukan dirumah Bapak Ali, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2013, jam 19.00 WIB).

Pemberian motivasi oleh Kepala Desa Bareng kepada masyarakatnya selain dengan bentuk diatas, juga diberikan melalui pemberian semangat dan dorongan kepada masyarakatnya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan lomba di tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten seperti misalnya lomba-lomba yang diadakan pada saat 17an (17 Agustus). Oleh karena itu, kehadiran Kepala Desa secara langsung dan ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya sangatlah diharapkan, kehadiran secara aktif Kepala Desa ini selain dapat memberikan dorongan dan semangat secara langsung kepada masyarakatnya agar termotivasi untuk berpartisipasi juga dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antara Kepala Desa dan masyarakatnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Subeki selaku Kepala Desa Bareng yang mengatakan bahwa :

“Dalam setiap kesempatan saya mengusahakan untuk selalu hadir dalam semua kegiatan pembangunan yang dilakukan warga, akan tetapi kadang karena keterbatasan waktu yang saya punya jadi saya tidak bisa ikut andil/turun tangan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Untungnya warga dapat mengerti dan yang dapat saya lakukan hanya memberi semangat dan motivasi kepada warga”.

(Wawancara di Kantor Kepala Desa, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 jam 09.30 WIB).

Dapat dilihat disini bahwa Kepala Desa Bareng selalu memotivasi warganya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan di desa, serta berusaha menggerakkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

b. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Demikian juga dengan Kepala Desa Bareng sebagai pemimpin formal di desanya harus melaksanakan tugas koordinasi untuk mengarahkan dan menelaraskan sehingga tercipta semangat berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tugas koordinasi tersebut maka Kepala Desa harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada warga sehingga informasi yang diberikan oleh Kepala Desa dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga jelas arah dan tujuan dilakukannya pembangunan tersebut. Kemampuan Kepala Desa dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya sangat mempengaruhi tingkat partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pembangunan di desa, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Seperti halnya dengan Kepala Desa Bareng, karena mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan warganya, maka warga akan mudah mengerti dan memahami informasi yang disampaikan oleh Kepala Desanya.

Sebelum mengkoordinasikan setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Bareng dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng. Kegiatan koordinasi dan komunikasi juga dilakukan langsung dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan setiap program pembangunan yang telah disusun oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat, dengan begitu maka masyarakat akan lebih mengerti dan paham terhadap program pembangunan di desanya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Subeki selaku Kepala Desa Bareng yang mengatakan bahwa :

“Kegiatan koordinasi pembangunan dilakukan melalui sebuah rapat formal dengan mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas program apa saja yang perlu dilakukan di desa, kemudian akan dimusyawarahkan langsung kepada seluruh elemen masyarakat, dan dibuat prioritas mengenai pembangunan mana yang diutamakan terlebih dahulu yang mendesak untuk dilakukan. Cara ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat lebih mengerti dan paham akan program pembangunan di desanya”. (Wawancara di Kantor Kepala Desa, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 jam 09.30 WIB).

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng selain pada rapat, juga dilakukan pada saat kegiatan pembangunan berlangsung. Beliau selalu mengkoordinasikan segala sesuatunya terlebih dahulu kepada perangkat desanya maupun kepada masyarakat mengenai kegiatan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak menyimpang.

c. Melaksanakan Tugas Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Kaitannya dengan itu, Kepala Desa Bareng didalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, dilakukan dengan kehadiran Kepala Desa dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, kehadiran Kepala Desa ini untuk mengamati dan mengawasi jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh warganya, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Kegiatan pengawasan ini selalu dilakukan oleh Kepala Desa Bareng setiap kali ada pelaksanaan program pembangunan. Kepala Desa selalu hadir dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk sekedar melihat dan memastikan apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan yang diharapkan atau belum, dan juga untuk memotivasi warga masyarakat yang ikut bekerja.

Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Desa melalui pertanggungjawaban yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai penggunaan biaya yang dialokasikan untuk pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Bareng melalui pertanggungjawaban masing-masing ketua lingkungan berupa penyerahan laporan beserta dengan kuitansi-kuitansi pengeluaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang akan diserahkan ke Pemerintah Desa yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan dilaporkan oleh Kepala Desa ke Pemerintah Kabupaten Jombang. SPJ ini berisikan laporan mengenai jumlah

pengeluaran dana yang telah dikeluarkan selama program pembangunan tersebut dilaksanakan di Desa Bareng.

Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Subeki selaku Kepala Desa Bareng yang mengatakan bahwa:

“Saya selalu mengusahakan untuk bisa hadir dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa untuk mengamati dan mengawasi jalannya pembangunan, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah belum, pengawasan lain yang saya lakukan sebagai Kepala Desa berupa permintaan laporan kepada masing-masing ketua lingkungan warga mengenai penggunaan alokasi dana desa, yang kemudian laporan tersebut dijadikan dasar pembuatan SPJ untuk Pemerintah Kabupaten”.

(Wawancara di Kantor Kepala Desa, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 jam 09.00 WIB)

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena demi suksesnya pembangunan dan pencapaian hasil yang baik membutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan tersebut. Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam hal perencanaan yang akan dibahas disini bukanlah masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi melalui wakil-wakilnya baik yang berada dalam kepengurusan LKMD maupun tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, dan masyarakat lainnya yang dianggap mampu dan bijaksana dalam membangun desanya, dan tidak terkecuali ketua RT dan RW masing-masing lingkungan warga.

Partisipasi masyarakat melalui perwakilannya dalam hal perencanaan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat/musyawarah yang membahas tentang rencana atau program-program yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan di Desa Bareng. Para wakil masyarakat ini akan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya kemudian akan disampaikan di depan forum rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Bareng, dengan maksud kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng akan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Rapat/musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan di Desa Bareng ini tidak rutin dilakukan tiap bulan, hanya akan dilakukan ketika akan ada kegiatan pembangunan yang perlu untuk dilaksanakan di Desa Bareng. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Subeki selaku Kepala Desa Bareng yang mengatakan bahwa:

“Saya akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, PKK, LKMD, BPD dalam sebuah rapat yang pelaksanaannya tidak rutin tiap bulan, melainkan jika ada topik, tema tentang rencana kesimpulan dan tindak lanjut tentang pembangunan di Desa Bareng. Dan tidak mungkin saya mengundang rapat kalau tidak ada tema atau topik tertentu”.
(Wawancara di Kantor Kepala Desa, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 jam 09.00 WIB)

Dalam rapat itu perwakilan dari masing-masing lingkungan warga akan menyampaikan usul dan aspirasi mereka mengenai pembangunan apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, kemudian dari masing-masing usul pembangunan tersebut akan dicari prioritasnya, pembangunan apa yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu di Desa Bareng, dan untuk pembangunan yang lain akan menyusul pelaksanaannya di tahun berikutnya.

Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam hal perencanaan pembangunan di desanya tidak dilakukan oleh keseluruhan masyarakat melainkan melalui wakil-wakil mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Subeki selaku Kepala Desa Bareng yang mengatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan sangat besar sekali, baik itu pembangunan dari dana swadaya maupun dana pemerintah, masyarakat sendiri yang merencanakan, dari masing-masing RT/RW ada program apa kemudian ditata dulu, kalau memang masih dalam skala kecil yang biayanya tidak terlalu tinggi dapat dijangkau oleh swadaya saja tapi kalau biayanya besar akan diusulkan ke Pemerintahan

Desa dengan menggunakan Alokasi Dana dari Pemerintah Kabupaten. Jadi, perencanaan pembangunan di Desa Bareng ini berasal dari bawah yaitu masyarakat, kemudian melalui ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat, usul dari masyarakat tersebut akan dibawa dalam sebuah rapat yang disebut Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) yang saya pimpin sendiri, kemudian akan dibuat skala prioritas, pembangunan mana yang terlebih dahulu akan dilakukan, jadi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan disini melalui wakil-wakilnya”.

(Wawancara di Kantor Kepala Desa, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 jam 09.00 WIB)

Dari hal diatas dapat dilihat juga bahwa Musbangdesa (Musyawarah Pembangunan Desa) yang dilaksanakan di Desa bareng juga membahas tentang perencanaan pembangunan, program-program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Desa Bareng, dan juga membahas evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa beserta dengan perangkat desa. Karena dengan diadakannya Rembug Desa/Musbangdes ini maka seluruh masyarakat akan dapat mengemukakan pendapat dan pikirannya yang berkaitan dengan pembangunan desa, dengan begitu pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng akan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Partisipasi ini diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya tanpa kecuali, pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di desa. Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang:

1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan desanya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga yang ada di desa Bareng didasari dengan semangat gotong royong yang telah mendarah daging dalam jiwa masyarakat Desa Bareng. Karena sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nuansa pedesaannya masih sangat kental, oleh karena itu semangat gotong royong yang mereka miliki sangat tinggi. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam bentuk gotong royong, perwujudannya dilaksanakan dalam bentuk kerja bakti. Kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bareng adalah mengadakan perbaikan/rehab Kantor Desa, pengerasan jalan dusun, pengeboran air tanah, pembuatan saluran irigasi, makadam jalan desa dan lain-lain.

2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya uang/materi

Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa juga dapat dilakukan dalam bentuk swadaya uang/materi. Swadaya uang yang dimaksud adalah hasil sumbangan dari warga masyarakat sedangkan sumbangan materi dapat berupa bahan-bahan material, makanan dan minuman, dan lain-lain. Sumbangan uang/materi ini dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swadaya uang oleh masyarakat, biasanya yaitu kegiatan pembangunan yang biayanya masih dapat dijangkau masyarakat melalui sumbangan iuran, seperti pembuatan pos siskamling, pembuatan parit-parit dan lain-lain.

c. Pengawasan

Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam

pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan diperlukan karena masyarakatlah yang berkaitan langsung dan pelaksana dari kegiatan pembangunan yang ada di desa, oleh karena itu diperlukan kepeduliannya untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan beserta dengan alokasi dana desa (ADD) yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jombang akan memberikan bantuan berupa alokasi dana desa kepada setiap desa/kelurahan dengan besaran nominal yang sama tiap desa. Alokasi dana desa diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu desa yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat yakni dalam hal swadaya uang dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut. Alokasi dana desa diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dimaksudkan sebagai sarana yang stimulan atau perangsang untuk mendorong dan menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya untuk menciptakan keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng dalam pelaksanaan pembangunan di desanya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap pekerjaan proyek-proyek pembangunan yang berasal dari dana bantuan Pemerintah Kabupaten Jombang, dan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut maka akan dilaporkan kepada Pemerintah Desa, yang kemudian akan berlanjut pada laporan ke Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

- b. Pengawasan penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dikeluarkan untuk pembangunan, yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat yaitu ketua RT/RW yang kemudian dilaporkan ke Pemerintah Desa.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Muchtar selaku Sekretaris Desa, yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan cukup kritis terutama mengenai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang, keingintahuan mereka sangatlah besar dan pertanyaan mereka mengarah kepada supaya bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat jangan sampai diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu dan harus langsung dapat digunakan untuk pembangunan desa”. (Wawancara dilakukan di Kantor Desa, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 jam 09.00 WIB).

d. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi, karena evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam suatu organisasi, dengan begitu akan mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan juga kekurangan-kekurangan dari hasil pekerjaan yang perlu untuk diperbaiki dan dilengkapi demi kesempurnaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan semula. Kaitannya dengan pembangunan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui kekurangan yang perlu untuk diperbaiki.

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tidak sebatas pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan saja, akan tetapi mereka selalu bertanggung jawab akan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi terhadap pembangunan yang ada di desanya, baik dalam mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan maupun dalam kegiatan pekerjaan perbaikan hasil dari pembangunan

tersebut. Bahkan biasanya yang mengetahui keadaan/kondisi jalan atau fasilitas desa yang perlu untuk diperbaiki karena hasil dari pelaksanaan pembangunan yang kurang optimal adalah berasal dari masyarakat itu sendiri dengan mengevaluasi hasil dari pekerjaan mereka setelah itu mereka akan melaporkan ke perangkat desa dan kemudian akan dimusyawarahkan dalam sebuah rapat evaluasi yang membahas tentang kegiatan pelaksanaan perbaikan terhadap fasilitas atau jalan yang perlu untuk diperbaiki. Kegiatan evaluasi juga penting untuk mengetahui kegiatan pembangunan mana yang telah berhasil dilaksanakan, yang belum, dan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunaryo selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Bareng yang mengatakan kepada penulis bahwa:

“Apabila ada program-program pembangunan yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) maupun swadaya baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di Desa Bareng, maka masyarakat akan melakukan penilaian/evaluasi mengenai program pembangunan mana yang telah diselesaikan, dan apabila nantinya ada kekurangan maka di tahun berikutnya harus diperhatikan, sedangkan yang belum sama sekali akan dijadikan acuan prioritas untuk tahun berikutnya”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Kepala Desa Bareng, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 jam 09.00 WIB)

Selain itu ditempat dan waktu yang berbeda seorang informan, yaitu Bapak Supradi selaku Tokoh Masyarakat Desa Bareng, mengatakan bahwa :

“Masyarakat selalu mengevaluasi hasil kerja bakti yang telah mereka lakukan, sudah sesuai apa belum, apabila belum maka akan dilakukan perbaikan ulang untuk memperbaikinya, dan apabila dibutuhkan biaya lagi akan dibicarakan lewat forum seperti rapat atau musyawarah dengan warga, ketua RT/RW dan perangkat desa”.

(Wawancara dilakukan di rumah Bapak Supradi, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 jam 19.00 WIB).

e. Memelihara Hasil-hasil Pembangunan Desa

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu diharapkan masyarakat ikut menjaga dan memelihara semua hasil pembangunan di desanya dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua masyarakat desa hendaknya dapat memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik, namun tidak hanya sebatas

memanfaatkannya, tetapi juga ikut menjaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan yang berupa fasilitas desa seperti pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, pembuatan saluran irigasi, pembuatan parit, pembangunan masjid dan gotong royong atau kerja bakti.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya seringkali mendapat atau menemui berbagai kendala baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sebagian besar Pemerintah Desa di Indonesia belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, dikarenakan masih banyaknya kelemahan/keterbatasan yang terdapat di lingkungan pemerintahan desa itu sendiri. Sangat tidak mungkin pemerintah desa akan dapat membangun desa, memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, jika tidak melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada di lingkungan desa tersebut.

a. Kendala Internal

1) Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik dari Kepala Desa kepada masyarakatnya maka seringkali dalam pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan, karena dengan adanya komunikasi dapat menjalin hubungan yang baik dan erat antara Kepala Desa dengan masyarakatnya.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desanya dan ujung tombak keberhasilan pembangunan di desanya, harus mampu memahami dan menyampaikan berbagai informasi dan program pembangunan dalam rangka mempengaruhi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di desanya.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng selain dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan dan musyawarah (rembug desa) juga dilakukan pada saat Kepala Desa Bareng melakukan kunjungan ke wilayah lingkungan RT/RW setempat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sadim selaku Ketua RT Desa Bareng, yang mengatakan bahwa:

“Jika Bapak Kepala Desa datang ke lingkungan RT/RW kami, beliau selalu berinteraksi dengan para warga sekitar, dan beliau juga selalu mendengarkan keluhan yang diutarakan oleh warga”.

(Wawancara dilakukan dirumahnya, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 jam 13.00 WIB)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Kusdianto selaku Ketua LPMD Bareng yang mengatakan bahwa:

“Bapak Kepala Desa itu orangnya ramah dan mudah bergaul, jadi seperti tidak ada batasan antara pemimpin dan bawahannya. Sehingga masyarakat juga tidak merasa sungkan atau takut”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Kepala Desa Bareng, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2013 jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa komunikasi tidak hanya harus datang dari atas melainkan harus bersifat timbal balik (dua arah), agar tercipta interaksi yang

baik antara Kepala Desa dan masyarakatnya. Dan hendaknya komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng dapat dilakukan secara langsung dan kontinue agar dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya.

2) Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya maupun di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya. Ada beberapa model kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin, dimana akan berbeda dari satu pemimpin dengan pemimpin lainnya, model atau kepemimpinan tersebut yaitu: gaya militeristis, gaya otokratis, gaya paternalistis, gaya kharismatis dan gaya demokratis.

Sedangkan untuk Kepala Desa Bareng, gaya kepemimpinan yang digunakan di dalam memimpin masyarakatnya dan juga dalam mengupayakan partisipasi masyarakat adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kepala Desa Bareng selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan aparat desa maupun warga masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan juga agar tidak timbul kesenjangan yang terlampau jauh antara dirinya dengan seluruh warga masyarakat. Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kepala Desa Bareng tidak hanya sekedar memberi perintah kepada warganya untuk melaksanakan suatu kegiatan, beliau juga selalu mendengarkan atau memberi kesempatan kepada warganya untuk memberi saran, pendapat atau bahkan kritik-kritik dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Kepala

Desa Bareng selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui sebuah rapat/musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh staf urusan Kesra yaitu Bapak Syamsul H, yang mengatakan bahwa:

“Bapak Kepala Desa mampu bersosialisasi/bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat”
(Wawancara dilakukan di Kantor Kepala Desa, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 jam 10.00 WIB)

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Jito selaku Tokoh Masyarakat Desa Bareng yang mengatakan bahwa:

“Bapak Kepala Desa ialah seorang yang sabar, dan beliau selalu mendengarkan setiap saran, kritik dan masukan dari warga, sebelum mengambil keputusan beliau selalu memusyawarahkannya dulu dengan semua pihak termasuk masyarakat melalui perwakilannya masing-masing didalam sebuah rapat”
(Wawancara dilakukan dirumahnya, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 jam 15.00 WIB).

Berdasarkan prinsip inilah Kepala Desa didalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya sekedar memberi program pembangunan yang sudah dalam bentuk jadi untuk dilaksanakan masyarakat, tetapi Kepala Desa selalu mendahuluinya dengan rapat desa untuk membicarakannya dengan perwakilan masyarakat yang membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng, dengan begitu pembangunan yang dilaksanakan di desa akan lebih menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

b. Kendala Eksternal

Didalam suatu organisasi apapun, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, peran seorang pemimpin dalam memimpin orang-orang yang ada di dalam organisasi tidak akan selalu berjalan dengan mulus, pasti akan ada hambatan atau permasalahan yang harus dihadapi. Demikian juga yang terjadi di Desa Bareng, dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, Kepala Desa

Bareng juga mengalami hambatan, beberapa faktor penghambat bagi upaya Kepala Desa Bareng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya adalah sebagai berikut:

1) Kecenderungan Masyarakat Untuk Menunggu Bantuan

Adanya ADD (Alokasi Dana Desa) telah memberikan kontribusi yang positif dalam upaya Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Karena dengan adanya ADD telah membantu meringankan beban masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan. Namun di lain pihak, dengan adanya ADD telah membuat masyarakat menjadi tergantung akan dana tersebut sehingga membuat sebagian masyarakat mempunyai pemikiran/kecenderungan untuk menunggu dan mempertimbangkan sumbangan atau bantuan yang akan diberikan untuk pembangunan desanya sebagai wujud dari partisipasinya.

Karena dana pembangunan telah terbantu dengan adanya ADD, maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk memberikan sumbangan atau bantuan dalam bentuk uang, mereka akan lebih tertarik untuk memilih memberikan sumbangan tenaga atau makanan dan minuman. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Subeki selaku Kepala Desa Bareng yang mengatakan bahwa:

“ADD merupakan faktor yang mendukung pembangunan yang ada di desa Bareng, namun di sisi lain, dengan adanya dana tersebut telah membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir ulang, dan mempertimbangkan bantuan yang akan mereka berikan untuk pembangunan desanya, mereka akan cenderung lebih memilih memberi makanan dan minuman untuk kegiatan kerja bakti dibandingkan dengan memberikan sumbangan uang”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Kepala Desa, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus jam 09.00 WIB).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Elyk A.K selaku Kaur Keuangan Desa Bareng, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini masih ada yang beranggapan bahwa ADD yang diberikan oleh Pemerintah hanya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan fisik desa saja mereka hanya tahu bahwa sudah ada bantuan dari pemerintah melalui ADD, sehingga kadang mereka enggan memberikan bantuan dalam bentuk swadaya uang”.
(Wawancara di rumahnya, pada hari Jum’at, tanggal 24 Agustus jam 16.00 WIB)

Permasalahan seperti ini seringkali dihadapi oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa di dalam mengkoordinir masyarakat untuk kegiatan pembangunan desa, namun hal ini memang tidak terlalu menjadi masalah yang berarti. Akan tetapi jika pola pikir seperti ini dibiarkan terus berkembang di masyarakat maka dapat menghambat jalannya pembangunan di Desa Bareng. Oleh karena itu diperlukan upaya dari Kepala Desa untuk mampu memberikan penjelasan yang sedalam-dalamnya dan menyeluruh kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan dari ADD (Alokasi Dana Desa) tersebut agar masyarakat dapat lebih mengerti dan dengan begitu masyarakat akan lebih ikhlas dan sukarela dalam memberikan sumbangan untuk pembangunan desanya dan tidak cenderung untuk menunggu dan mengharapkan bantuan dari pemerintah saja.

2) Tingkat Pendapatan Masyarakat

Hambatan yang sering dihadapi dalam suatu kegiatan yaitu kurangnya dana yang diperlukan untuk jalannya proses kegiatan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bareng, masyarakat Desa Bareng sangat antusias sekali dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya, mereka akan mengerahkan segala tenaga dan pikirannya untuk suksesnya pembangunan tersebut, namun jika diperlukan sumbangan dana yang sedikit besar, hal ini akan sulit bagi sebagian masyarakat Desa Bareng. Keadaan seperti ini bisa dipahami mengingat tingkat pendapatan masyarakat Desa Bareng yang sebagian besar masih rendah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Bareng adalah sebagai petani atau bahkan buruh tani, yang mana upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya.

Seperti yang disampaikan oleh seorang informan yaitu Bapak Kusdianto selaku ketua LPMD Desa Bareng yang mengatakan kepada penulis bahwa:

"Untuk partisipasi tenaga, masyarakat Desa Bareng tidak dapat diragukan, mereka selalu bergotong royong, namun untuk swadaya uang, ini dirasa sulit. Setiap kegiatan pembangunan di desa yang membutuhkan dana yang lumayan besar, akan sulit untuk dimintakan sumbangan ke warga, hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang masih rendah, untuk kebutuhan hidup saja terkadang juga masih sulit".

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, jam 09.00 WIB).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sukardi selaku Kepala Dusun Bareng, yang mengatakan bahwa:

"Sebenarnya masyarakat disini juga tidak susah untuk diajak urunan (iuran) untuk kegiatan pembangunan, asalkan jelas untuk apa saja dan ada buktinya, apalagi jika menyangkut kepentingan bersama seperti pembuatan saluran irigasi mereka akan mengusahakan dana tersebut, akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri jika sumbangan yang dibutuhkan itu lumayan besar, masyarakat desa akan merasa kesusahan". (Wawancara di Kantor Kepala Desa, pada Hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 jam 11.00 WIB).

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh para informan kepada penulis maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bareng di dalam keikutsertaannya dalam pembangunan di desanya, untuk partisipasi tenaga tidak perlu diragukan, mereka selalu bergotong royong di dalam membangun desanya, namun untuk swadaya masyarakat dalam bentuk uang hal ini masih dirasa sulit atau kurang karena tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Desa Bareng masih rendah. Oleh karena itu diharapkan bagi masyarakat Desa Bareng yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik diharapkan memberikan sumbangan yang lebih baik untuk menutupi kekurangan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu kekurangan dana untuk pembangunan desa dapat tertutupi. Dari pihak pemerintah desa sendiri diharapkan dapat memberikan laporan atau penjelasan tentang alokasi dana yang dikeluarkan untuk pembangunan desa dengan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat desa akan mengerti untuk apa saja alokasi

dana tersebut dan hal itu dapat membuat mereka untuk percaya dan memudahkan di dalam memberikan sumbangan dana untuk pembangunan di Desa Bareng.

3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat desa Bareng mempunyai tingkat pendidikan hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dengan keadaan pendidikan masyarakat yang seperti ini, jelas bahwa di dalam upaya Kepala Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menemui hambatan. Meskipun yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, bahwa dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah seperti itu, dapat memberikan tingkat partisipasi terhadap pembangunan yang tinggi terutama partisipasi yang berupa swadaya tenaga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam upaya peningkatan partisipasi tersebut, Kepala Desa menemui hambatan yang berupa kesulitan di dalam penyampaian informasi ataupun program-program pembangunan. Penyampaian informasi maupun program-program pembangunan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan untuk masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah akan diperlukan usaha yang lebih mendalam bagi Kepala Desa beserta dengan perangkatnya informasi dan program-program pembangunan tersebut agar dapat dimengerti dan dipahami oleh mereka. Usaha yang dimaksud dapat berupa penyuluhan sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh informan kepada penulis yaitu Bapak Kusdianto selaku ketua LPMD Bareng yang mengatakan kepada penulis bahwa:

"Untuk masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah dibutuhkan penyampaian/penyuluhan yang sedalam-dalamnya, jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah agar mereka dapat dimengerti dan paham. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, di dalam

memberikan informasi dan arahan kepada mereka akan lebih mudah, karena mereka akan lebih cepat mengerti". (Wawancara dilakukan di Kantor Desa, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, jam 13.00 WIB).

Meskipun di dalam penyampaian informasi dan program-program pembangunan terhadap masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi lebih mudah jika dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, di sisi lain mereka yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan lebih sulit jika dimintai partisipasinya dalam bentuk tenaga kasar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto yang mengatakan bahwa:

"Selain memberikan keuntungan, masyarakat yang berpendidikan tinggi juga mempunyai sedikit kekurangan, diantaranya jika dimintai partisipasinya dalam bentuk tenaga kasar, mereka akan merasa enggan karena gengsi untuk melakukan pekerjaan tersebut, lain halnya dengan masyarakat yang berpendidikan rendah, mereka akan semangat sekali" (Wawancara dilakukan di Kantor Desa, pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2013, jam 10.00 WIB).

Dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh para informan, maka jelas bahwa antara masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, yang mana hal tersebut akan saling melengkapi.

C. Analisis dan Intepretasi Data

1. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Didalam melaksanakan pembangunan desa yang perlu mendapat perhatian adalah upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Bareng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena dalam pembangunan desa Kepala Desa adalah satu-satunya orang

yang mendapat kepercayaan dari seluruh warga untuk memimpin kegiatan pembangunan.

Kepala Desa sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan haruslah mempunyai sikap yang luwes dan tanggap akan keadaan desanya, sehingga akan memperoleh respon yang positif dari warganya.

Berdasar pada data fokus pada bab sebelumnya, maka penulis akan membahas data fokus:

a) Memberikan Motivasi

Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 2001:106).

Seperti halnya dengan pendapat di atas dan penjelasan pada data fokus, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Bareng telah melaksanakan peranannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan di desa.

Motivasi secara sosial yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng berupa pemberian arahan, binaan ataupun penyuluhan kepada para wakil masyarakat maupun seluruh masyarakat Desa Bareng tentang informasi dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng dan memberikan pengertian akan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan melalui sebuah rapat atau musyawarah desa yang disebut juga dengan rembug desa

yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Motivasi secara sosial yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng juga dilakukan dengan menghadiri secara langsung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakatnya, dan terkadang Kepala Desa Bareng juga turun tangan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak terlalu berat, misalnya kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kesenjangan yang terlalu jauh antara seorang pemimpin dan bawahan.

Motivasi secara fisiologis yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng lebih ditekankan dalam bentuk pemberian makanan dan minuman pada saat kegiatan pembangunan berlangsung, karena makanan dan minuman juga dapat membangkitkan semangat warga untuk bekerja, dimana biasanya Kepala Desa Bareng akan memberi tahu kepada panitia konsumsi agar selalu menyediakan makanan dan minuman pada setiap kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng ini merupakan suatu rangsangan bagi masyarakat, agar melaksanakan kegiatan pembangunan secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun rasa sungkan kepada Kepala Desa, jadi secara ikhlas dengan penuh rasa tanggung jawab dan agar setiap warga menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut.

Sehingga pemberian motivasi mutlak harus dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desanya, karena hal itu akan mendorong masyarakat untuk melaksanakan setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya secara sukarela dan penuh tanggung jawab tanpa adanya paksaan atau rasa sungkan semata. Karena itu diharapkan Kepala Desa Bareng mampu mengarahkan, membimbing dan menghimpun masyarakatnya untuk ikut aktif di dalam melaksanakan program-program

pembangunan agar sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan diharapkan sebisa mungkin Kepala Desa bisa berada di tengah-tengah para bawahannya maupun masyarakatnya dan demikian dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Pemberian motivasi juga dapat mempererat dan mendekatkan hubungan antara Kepala Desa dan masyarakatnya ataupun juga sesama masyarakat desa, dengan begitu Kepala Desa akan dekat dengan masyarakatnya dan masyarakat sendiri akan lebih mengenal pemimpinnya, dengan begitu akan memudahkan Kepala Desa di dalam memimpin dan menghimpun masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam pembangunan desa.

b) Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi adalah merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2005:85). Sedangkan pengertian komunikasi menurut Thoha (2007:167) adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain.

Sesuai dengan pendapat diatas maka komunikasi kaitannya dengan pembangunan desa merupakan salah satu media bagi Kepala Desa untuk menyampaikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa dan sekaligus sebagai salah satu cara untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, karena jika seorang Kepala Desa dapat melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, maka masyarakat akan cepat memahami dan menterjemahkan program pembangunan dengan baik pula.

Sedangkan koordinasi hubungannya dengan pembangunan yaitu merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menghimpun, mengarahkan dan menyelaraskan berbagai

program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa. Kepala desa sebagai ujung tombak daripada keberhasilan pembangunan desa harus mampu memahami dan menterjemahkan program pembangunannya serta mampu mengkomunikasikan program pembangunan dalam kegiatan nyata kepada masyarakatnya sehingga sebagai umpan baliknya ada kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng di dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah dengan mengundang para wakil masyarakatnya dalam rapat formal dan non formal. Rapat formal biasanya dilakukan di Kantor Kepala Desa dengan mengundang para wakil masyarakat untuk membahas rencana program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng ataupun rapat evaluasi mengenai evaluasi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan rapat non formal dalam kaitannya dengan komunikasi yaitu dilakukan oleh Kepala Desa Bareng dengan masyarakat ialah dengan melakukan kunjungan ke setiap wilayah lingkungan RT/RW sekedar berkonsultasi dan melakukan interaksi secara langsung dengan warga masyarakat. Selain itu, Kepala Desa Bareng juga selalu melakukan koordinasi dengan semua masyarakat desa melalui rembug desa yang mengundang seluruh elemen masyarakat yang akan membahas program-program pembangunan yang perlu dilaksanakan di desa dan juga kegiatan Kepala Desa dan warga dalam bentuk gotong royong ataupun penyuluhan tentang suatu program pembangunan yang berasal dari arahan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Rapat formal di Desa Bareng ini tidak rutin dilakukan tiap bulan, melainkan hanya ketika ada rencana atau topik pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Oleh karena itu hendaknya di dalam melakukan koordinasi dengan para wakil masyarakat

dalam rapat formal bisa dilakukan setiap bulan, hal ini untuk mengetahui detail perkembangan yang ada di Desa Bareng sehingga dapat diketahui pembangunan mana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai prioritas.

Kegiatan koordinasi juga memerlukan adanya jalinan komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan para wakil masyarakat, sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng merupakan hasil persepsi dan pemikiran bersama searah dan satu tujuan. Kepala Desa Bareng sebagai ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di desanya, diharapkan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mampu mengkomunikasikan program pembangunan dalam kegiatan nyata kepada masyarakatnya sehingga umpan baliknya ada kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat.
2. Mampu menterjemahkan setiap program pembangunan baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Jombang maupun program dari desa sendiri.
3. Mampu menjalin komunikasi yang baik, baik dengan para wakil masyarakat maupun dengan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu apabila Kepala Desa mampu mengkomunikasikan setiap program pembangunan dan mampu melaksanakan koordinasi dengan baik maka kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat akan dapat selesai dengan cepat dan dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

c) Melaksanakan Tugas Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:112).

Sesuai dengan pendapat di atas dan juga apa yang telah dibahas pada penyajian data fokus sebelumnya, maka kaitannya dengan itu, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng dalam kegiatan pembangunan di desanya dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng dilakukan baik mulai dari rapat desa untuk merencanakan jalannya program pembangunan hingga pengawasan terhadap jalannya kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan di desa dengan cara menghadiri kegiatannya secara langsung untuk melihat dan mengamati pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh warganya.

Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang Kepala Desa maka beliau tidak mungkin akan terus hadir untuk memantau jalannya pembangunan, karena itu sering pula beliau harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng dilakukan dengan cara mengawasi administrasi keuangan untuk pembangunan di desanya, meliputi penggunaan dana yang dibutuhkan beserta dengan alokasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan meminta seluruh bukti berupa kwitansi melalui perwakilan masyarakat, misalkan saja pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan beserta dengan rincian biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan desa.

Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Bareng sudah baik, karena selain mengawasi jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, beliau juga melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam hal ini para aparatur desa mengenai kinerja mereka dalam program-program pembangunan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada administrasi keuangan pembangunan,

Kepala Desa di dalam melaksanakannya sudah cukup baik, beliau selalu meminta laporan penggunaan biaya pembangunan baik bantuan dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) maupun dana swadaya masyarakat melalui para wakil masyarakat yang kemudian akan dijadikan dasar pembuatan SPJ yang selanjutnya akan diserahkan oleh Kepala Desa ke Pemerintah Kecamatan dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang.

Hal-hal diatas perlu dilakukan untuk memantau jalannya kegiatan pembangunan supaya rencana pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah dirumuskan sebelumnya, selain itu kegiatan pengawasan juga diperlukan untuk menilai dan mengoreksi atau mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi terhadap kinerja aparatur desa.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a) Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2003:88). Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena perencanaan merupakan kegiatan awal dalam rangkaian yang menyeluruh yang merupakan alat dari pembangunan dan sebagai tolak ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Perencanaan sebagai alat pembangunan, karena perencanaan merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Sedangkan perencanaan sebagai tolak ukur dalam pembangunan, maksudnya yaitu sebagai tolak ukur dari keberhasilan dan

kegagalan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu desa. Hal ini mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan yang berhasil bisa jadi karena mempunyai perencanaan yang baik dan sudah matang sehingga di dalam pelaksanaannya akan mudah di dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan tersebut. Sedangkan untuk pembangunan yang gagal, bisa jadi karena aspek perencanaan yang kurang baik atau kurang matang sehingga kurang jelas arah dan tujuannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam hal perencanaan pembangunan di desa melalui perwakilannya ini sudah cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa aspirasi masyarakat yang dibawa oleh para wakil mereka dalam forum rapat atau musyawarah perencanaan tersebut sudah terwakili dengan baik karena ide, saran, dan pemikiran mereka yang ditampung oleh para wakil masyarakat tersebut akan diajukan dan diusulkan dalam rapat tersebut dimana nantinya akan ditentukan rencana atau program mana yang sesuai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Selain itu setiap masyarakat Desa Bareng juga mempunyai kesempatan yang sama di dalam kegiatan perencanaan, baik dalam menyampaikan ide maupun di dalam pembuatan keputusan untuk pembangunan di desanya. Keputusan yang telah disepakati dalam kegiatan perencanaan merupakan hasil kesepakatan bersama, yaitu Kepala Desa, wakil masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, oleh karena itu hendaknya dipatuhi oleh seluruh masyarakat desa dan dapat dilaksanakan secara partisipatif. Partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Bareng ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan diantaranya yaitu kegiatan perencanaan, maka diharapkan mereka akan lebih mempunyai rasa memiliki terhadap setiap kegiatan pembangunan yang ada di desanya.

Dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan perencanaan melalui sebuah forum yaitu rembug desa yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun maka semua masyarakat Desa Bareng akan dapat mengeluarkan aspirasi dan pendapat mereka tentang program pembangunan apa yang perlu dilaksanakan di desa, dengan begitu setiap program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa akan lebih menyentuh kepentingan masyarakat Desa Bareng karena sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kegiatan perencanaan selain dilakukan melalui rembug desa juga dilakukan melalui sebuah rapat/musyawarah yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Desa dengan mengundang para wakil masyarakat untuk membahas rencana pembangunan di Desa Bareng yang dilakukan tidak rutin melainkan apabila akan dilaksanakan program-program pembangunan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa proses kegiatan perencanaan pembangunan dan juga partisipasi masyarakat di dalamnya sangat baik, karena telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan mengetahui itu semua, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan kegiatan pokok dalam usaha peningkatan pembangunan yang ada di desa dan oleh karena itu hendaknya kegiatan perencanaan terhadap pembangunan desa dapat disusun dan dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

b) Pelaksanaan

Partisipasi ini diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya tanpa kecuali, pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa.

Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang.

1) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Swadaya Tenaga

Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangunan desa diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dari terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang, tetapi sekaligus merupakan tantangan bagaimana mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembangunan yang efektif, positif, produktif dan dinamis.

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka otomatis pembangunan itu tidak akan dapat berjalan, karena pelaksana dari pembangunan itu sendiri adalah masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat bukan lagi sebagai objek dari pembangunan melainkan sebagai subjek dari pembangunan tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Bareng terhadap pembangunan di desanya sangat tinggi sekali, mereka akan sangat antusias sekali dalam setiap kegiatan pembangunan ataupun kerja bakti di desanya, hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota masyarakat yang diundang hampir seluruhnya datang untuk menghadiri kegiatan pembangunan maupun gotong royong tersebut. Hal ini dikarenakan semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bareng sangatlah besar dan telah berurat akar dalam jiwa mereka, dan juga mereka merasa memiliki akan desa mereka sendiri karena mereka beranggapan bahwa kalau bukan mereka yang melakukannya secara bergotong royong tidak mungkin pembangunan desa mereka akan berjalan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga bukan hanya dalam hal pembangunan, akan tetapi juga dalam hal kerja bakti gotong royong/ kerja bakti bersih desa yang masih sering dilakukan tiap minggunya. Hampir seluruh masyarakat hadir dalam kegiatan gotong royong ini. Seperti misalnya pada saat diadakan kerja bakti bersih desa yang dilaksanakan di dusun Bareng maupun di dusun Mojounggul, semua warga saling bahu-membahu dalam membersihkan lingkungannya, tanpa terkecuali dan bahkan mereka saling bercanda satu sama lain dan kegiatan ini dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Dan juga semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti saja tetapi juga dalam hal tolong-menolong sesama warga, misalkan dalam pembangunan rumah salah satu masyarakat, kematian, kelahiran, perkawinan dan lain sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bareng benar-benar sudah memahami akan pentingnya pembangunan untuk desanya. Oleh karena itu hendaknya semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bareng dapat dijaga dan dipupuk sehingga tidak akan terkikis dengan bertambah majunya jaman, dan hal itu merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh Desa Bareng yang patut dibanggakan, sehingga diperlukan peran dan dukungan dari semua pihak termasuk Kepala Desa untuk selalu mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, untuk selalu ikut serta dalam pelaksanaan sehingga akan mengarah pada pembaharuan keadaan desa menuju ke arah yang lebih baik.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Swadaya Uang

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan selain dalam bentuk swadaya tenaga juga berupa swadaya dalam bentuk uang. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari para informan yang disajikan pada data fokus, dapat disimpulkan

bahwa untuk swadaya uang yang diberikan oleh masyarakat Desa Bareng terhadap pembangunan di desanya, tingkat partisipasinya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan swadaya dalam bentuk tenaga. Bahkan setiap kali ada pembangunan yang membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan sumbangan uang dari masyarakat, masyarakat Desa Bareng akan mengalami kesulitan. Seringkali apabila terjadi kekurangan dana swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka kekurangannya akan diusahakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat.

Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat Desa Bareng masih rendah sehingga untuk mengeluarkan uang selain kebutuhan sehari-hari masih sulit untuk dimintakan ke masyarakat, hal ini dapat dimaklumi dikarenakan mata pencaharian penduduk Desa Bareng yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh pabrik dimana tingkat rata-rata pendapatan masyarakatnya masih sangat rendah. Akan tetapi selain partisipasi dalam bentuk tenaga maupun uang, masih ada bentuk partisipasi lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng contohnya dengan memberikan makanan ataupun minuman pada saat kegiatan pembangunan maupun kerja bakti hal ini setidaknya dapat sedikit membantu.

Namun ada juga beberapa masyarakat yang masih tergolong mampu dalam hal pendapatan dan mereka tidak merasa kesulitan jika dimintai sumbangan yang besar, akan tetapi biasanya untuk turun langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut mereka akan merasa enggan karena gengsi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, mereka akan dengan senang hati

membantu dengan tenaga, dengan cara turun serta secara langsung dalam kegiatan pembangunan.

Disamping itu juga masih ada sedikit rasa curiga terhadap perangkat desa dalam hal pengalokasian dana pembangunan tersebut, mereka terkadang takut jika nantinya dana tersebut diselewengkan. Sehubungan dengan itu, maka terkadang dari pihak Kepala Desa dan perangkat desa selalu memberikan penjelasan maupun pemahaman mengenai penggunaan dana tersebut akan dialokasikan kemana saja secara jelas, gamblang dan terperinci agar masyarakat desa akan mempercayainya dan jika perlu akan dilakukan rapat pertanggungjawaban Kepala Desa beserta dengan perangkat desa dengan mengundang para wakil masyarakat untuk membahas tentang biaya-biaya beserta dengan pengalokasian dana yang telah digunakan untuk pembangunan di Desa Bareng. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah untuk mengeluarkan sumbangan berupa uang demi pembangunan di desanya. Meskipun dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, mereka akan berusaha semaksimal mungkin dan dengan ikhlas dan sukarela memberikannya demi kemajuan desanya. Oleh karena itu diharapkan adanya timbal balik dari warga masyarakat itu sendiri, untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing dalam hal partisipasi dalam bentuk swadaya uang sehingga nantinya program pembangunan akan terus dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

c) Pengawasan

Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:112).

Sesuai dengan pendapat di atas, maka dalam rangka untuk mewujudkan hasil pembangunan yang berdaya guna maka diperlukan adanya kegiatan pengawasan oleh semua pihak dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik itu Kepala Desa maupun masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan pengawasan sangat penting untuk dilakukan, hal ini mencegah ataupun memperbaiki terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan apa yang telah diharapkan bersama.

Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa sudah cukup baik karena semua ikut andil, semua masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Namun untuk pelaporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa tetap dilakukan oleh ketua RT/RW masing-masing lingkungan warga yang kemudian akan dijadikan dasar pemuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) oleh Pemerintah Desa yang kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang oleh Kepala Desa. Kaitannya dengan hal itu, maka partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam kegiatan pengawasan pembangunan di desanya yaitu pengawasan terhadap pekerjaan proyek-proyek pembangunan yang berasal dari dana bantuan Pemerintah Kabupaten Jombang dan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut maka akan dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan melalui kecamatan. Selain itu juga melaksanakan pengawasan terhadap setiap pengeluaran dana beserta dengan alokasinya untuk pembangunan yang dananya berasal dari ADD. pengawasan ini dilakukan oleh para wakil masyarakat seperti ketua RT/RW.

Diharapkan kegiatan pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu saja, melainkan seluruh elemen masyarakat. Karena kegiatan pengawasan yang dilakukan sebenarnya adalah untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan dan juga agar tugas-tugas maupun program pembangunan yang telah ditentukan berjalan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang direncanakan.

d) Evaluasi

Kegiatan evaluasi jika dikaitkan dengan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, karena kegiatan ini untuk mengetahui apakah pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atautakah belum. Kegiatan evaluasi juga penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan tersebut, dan apabila terjadi kekurangan-kekurangan maka akan diperbaiki untuk kesempurnaannya. Dengan kata lain evaluasi adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, atau dengan kata lain evaluasi ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (Siagian, 2003:117).

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan di desanya, diwujudkan dalam kegiatan rapat evaluasi pembangunan dan juga kegiatan pekerjaan perbaikan hasil dari rapat evaluasi tersebut. Jumlah masyarakat yang mengikuti rapat evaluasi dan kegiatan perbaikan tersebut menurut informasi yang penulis peroleh, menyebutkan bahwa masyarakat Desa Bareng telah melaksanakan tugas tersebut dengan cukup baik, untuk kegiatan rapat evaluasi hanya dilakukan oleh para wakil masyarakat namun untuk kegiatan pelaksanaan perbaikan, dilakukan oleh keseluruhan masyarakat, mereka akan bergotong

royong untuk memperbaiki hasil pembangunan yang belum maksimal agar mengarah pada kesempurnaan, sehingga hasil pembangunan seperti apa yang diharapkan dapat terwujud.

Sesuai dengan hal diatas, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng dalam bentuk kerja bakti untuk perbaikan hasil pembangunan, dilakukan oleh masyarakat desa secara keseluruhan, inisiatif dan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sedangkan kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat berdasarkan masukan dari warga masyarakat itu sendiri. Para wakil masyarakat tersebut akan mengadakan rapat/musyawarah evaluasi terhadap pembangunan-pembangunan apa saja yang telah berhasil dilaksanakan di Desa Bareng dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kegiatan evaluasi di Desa Bareng juga digunakan untuk mengetahui kegiatan pembangunan mana yang telah berhasil dilaksanakan dari beberapa prioritas pembangunan yang perlu untuk dilakukan di Desa Bareng. Apabila suatu pembangunan belum selesai pelaksanaannya pada tahun ini, maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dan akan dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang. Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam kaitannya dengan kegiatan evaluasi terhadap pembangunan di desanya sudah dilakukan dengan baik. Seperti dapat dilihat dengan masih baiknya kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Bareng, sehingga dalam hal ini berarti mereka sudah sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut menjaga dan mengembangkan setiap pembangunan yang ada di desanya.

e) **Memelihara Hasil-hasil Pembangunan Desa**

Memelihara berarti ikut menjaga agar tetap lestari dan tetap bisa dimanfaatkan atau digunakan. Kaitannya dengan pembangunan, memelihara hasil-hasil pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan yang harus dilakukan oleh semua pihak, karena dengan melakukan hal tersebut, maka hasil dari pembangunan akan tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lebih lama, dan apabila terjadi kerusakan terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut maka akan dilakukan perbaikan.

Sesuai dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang ada di Desa Bareng telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan, kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat Desa Bareng bisa dilihat pada kondisi masjid maupun poskamling masih dalam kondisi yang baik dan sangat layak untuk digunakan dalam bidang perhubungan misalnya, dimana masyarakat tetap dapat menjalankan aktifitasnya dengan lancar karena kondisi jalan yang masih sangat baik, juga dalam hal pengairan dimana kondisi saluran-saluran irigasi yang ada masih baik. Akan tetapi memang ada beberapa sarana maupun prasarana yang perlu untuk dilakukan perbaikan, yaitu pada gedung sekolah SMP yang kondisinya sudah rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan.

Adapun rencana untuk melakukan perbaikan tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui sebuah forum rapat/rembug desa. Seperti pada pengaspalan jalan, apabila terjadi kerusakan maka akan dilakukan penyemiran jalan, yang inisiatifnya berasal dari masyarakat sendiri dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat secara kerja bakti, sedangkan untuk dananya, apabila dananya tidak terlalu besar maka akan dilakukan secara swadaya, tetapi jika diperlukan dana yang besar maka akan diusulkan

ke Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan dana ADD. Selain itu juga, masyarakat akan memperbaiki fasilitas-fasilitas desa yang mengalami kerusakan seperti gedung sekolah, kantor desa, jalan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng, jika diukur pada kegiatan kerja baktinya atau gotong royongnya sudah baik, mereka sangat partisipatif sekali dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya, khususnya dalam partisipasi secara swadaya tenaga. Namun lain halnya dengan swadaya uang, mereka akan merasa kesulitan termasuk didalamnya kegiatan pemeliharaan. Termasuk didalamnya kegiatan pemeliharaan terhadap hasil-hasil pembangunan telah dilaksanakan dengan baik, mereka sangat peduli akan kemajuan desanya.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a) Kendala Internal

1. Komunikasi

Komunikasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak. Sedangkan menurut Thoha (2006:167) yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan adalah komunikasi, karena gagasan-gagasan, kebijaksanaan, dan rencana, hanya akan mendapat dukungan bila diketahui dan kemudian dimengerti,

bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan masyarakat dan inspirasi masyarakat (kelompok masyarakat).

Seperti yang dijelaskan pada data fokus bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng kaitannya dengan pembangunan, dilakukan pada saat rapat maupun musyawarah dengan mengundang para wakil masyarakat yang pelaksanaannya tidak rutin tiap bulan. Hendaknya rapat atau musyawarah ini dapat dilakukan rutin setiap bulan, dengan begitu wakil masyarakat akan dapat menyampaikan setiap ide dan pemikiran dari masyarakat yang diwakilinya dengan lebih cepat sehingga Kepala Desa akan lebih mengerti kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Karena kegiatan komunikasi yang dilakukan Kepala Desa pada saat melakukan kunjungan ke lingkungan RT/RW setempat, dirasa masih kurang efektif karena bersifat informal. Seyogyanya kunjungan seperti ini hanya dijadikan ajang untuk saling mengenal antara Kepala Desa dan masyarakatnya sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara keduanya.

Sehingga diharapkan dengan terjalannya komunikasi yang baik, maka Kepala Desa Bareng akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng. Dengan begitu setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng akan lebih menyentuh kepentingan masyarakat Desa Bareng secara keseluruhan.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui dan mempengaruhi masyarakat, sehingga mereka akan mengikuti apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan instruksi yang diberikan oleh pemimpinnya. Dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan yang ada

ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin, karena pemimpin dilihat sebagai sosok sentral yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, pemimpin formal yang ada di desa ialah Kepala Desa.

Gaya kepemimpinan Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena apabila Kepala Desa menerapkan gaya kepemimpinan otoriter maka masyarakatnya akan merasa tertekan dengan cara Kepala Desa memimpin. Meskipun masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, akan tetapi partisipasi tersebut tidak dilakukan secara sukarela melainkan karena terpaksa ataupun sungkan kepada Kepala Desanya.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Bareng adalah gaya kepemimpinan demokratis karena pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, hal ini dimaksudkan agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Karena Kepala Desa Bareng adalah orang yang keputusan dan kebijakannya selalu didasarkan pada hasil proses demokrasi/musyawarah dan bukan dari kemauan beliau sendiri, dan juga beliau senang menerima kritikan, saran, pendapat dan masukan dari bawahan maupun dari warga masyarakat, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat.

Dengan gaya kepemimpinan yang demokratis seperti itu maka dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selalu didahului dengan rapat/musyawarah dan selalu memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk mengeluarkan ide atau pendapat mereka. Di samping itu juga Kepala Desa Bareng sangat komunikatif dengan masyarakatnya sehingga masyarakat lebih mengenal

pemimpinnya, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat akan selalu tumbuh dan berkembang luas di kalangan masyarakat desa.

b) Kendala Eksternal

Adapun beberapa kendala yang terjadi diluar yang dihadapi Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya adalah sebagai berikut:

1) Kecenderungan Masyarakat Untuk Menunggu Bantuan

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Jombang berupa ADD (Alokasi Dana Desa) tersebut telah mendukung dan membantu pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Bareng. Namun di sisi lain, dengan adanya bantuan tersebut telah membuat sebagian masyarakat menjadi mempertimbangkan bantuan atau sumbangan apa yang akan diberikan untuk pembangunan di desanya karena masyarakat lebih cenderung untuk menunggu bantuan dana dari pemerintah. Kecenderungan berpikir seperti ini muncul karena dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa) tersebut telah membuat masyarakat jadi menggantungkan dalam hal pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng. Masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa pembangunan di desa mereka sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, padahal maksud dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) itu sendiri ialah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sepenuhnya hanya untuk pembangunan fisik desa saja.

Dalam hal ini diharapkan adanya penjelasan dan arahan dari Kepala Desa maupun aparatur desa, agar masyarakat mau untuk merubah pola pikir mereka untuk tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah dan lebih sukarela di dalam memberikan bantuan untuk pembangunan di desanya dalam bentuk apapun baik itu tenaga, uang maupun bentuk materi lain. Karena jika kecenderungan seperti ini masih ada maka akan dapat menghambat program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng.

Oleh karena itu hendaknya agar permasalahan seperti ini dapat segera diatasi secepatnya, yaitu dengan memberikan pemahaman dan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada sebagian masyarakat yang mempunyai pola pikir seperti itu, agar mereka tidak seharusnya hanya tergantung pada dana dari ADD (Alokasi Dana Desa) tersebut, karena sifat dari bantuan tersebut hanya sedikit membantu dan tidak sepenuhnya membiayai pembangunan desa dan juga salah satu tujuannya ialah untuk merangsang partisipasi mereka agar lebih aktif, bersemangat dan termotivasi untuk melaksanakan pembangunan di desanya dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat sedangkan tanggung jawab penuh berjalannya kegiatan tersebut berada di tangan masyarakat.

2) Tingkat Pendapatan Masyarakat

Hambatan yang juga sering dihadapi oleh Kepala Desa Bareng di dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu adanya keterbatasan dana yang dikumpulkan dari swadaya uang masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat Desa Bareng yang masih rendah atau di bawah rata-rata. Contohnya setiap kali dibutuhkan sumbangan uang untuk pembangunan maka masyarakat desa akan merasa kesulitan, apalagi jika sumbangan yang dibutuhkan lumayan besar, sehingga tidak jarang Kepala Desa maupun

perangkatnya mengusahakan kekurangan dana tersebut, baik itu dari dana pribadi maupun bantuan dari luar untuk menutup kurangnya dana yang telah dikumpulkan oleh masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Bareng bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh, yang mana pendapatan yang mereka peroleh dirasa hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari dan juga sebagian masyarakat tidak mempunyai keahlian ataupun profesi lain yang setidaknya dapat membantu penghidupan mereka.

Oleh karena itu sesuai dengan tujuan dan sasaran dari rencana kegiatan pembangunan desa yaitu agar tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat yang dinamis dapat terlaksana, diharapkan agar Kepala Desa Bareng dapat mengupayakan peningkatan ekonomi bagi masyarakatnya yang masih tergolong rendah, misalkan saja dengan membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti koperasi, wartel, industri-industri rumah tangga dan lain-lain atau dengan membuka pusat-pusat keterampilan agar masyarakat bisa lebih mengembangkan kemampuan dan potensi diri mereka sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Di samping itu juga diharapkan bagi masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik, ikhlas untuk memberikan sumbangan yang lebih dari masyarakat yang keadaan ekonominya masih kurang, sehingga dapat membantu menutupi kurangnya dana pembangunan di desa, agar nantinya tidak menghambat jalannya program pembangunan tersebut.

3) Tingkat Pendidikan

Faktor penghambat bagi Kepala Desa Bareng di dalam menyampaikan informasi dan program-program pembangunan kepada masyarakat desa yang seringkali dihadapi yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Bareng buta huruf atau bahkan tidak

pernah mengenyam pendidikan sama sekali dan yang mempunyai tinjauan pendidikan yang rendah yaitu hanya tamat Sekolah Dasar (SD).

Dengan tingkat pendidikan yang rendah seperti itu, menjadikan hambatan kepada Kepala Desa Bareng di dalam penyampaian setiap informasi dan program-program pembangunan, mereka kurang tanggap, tidak cepat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bareng. Seperti pada saat menginformasikan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, masyarakat masih ada yang kurang paham maksud maupun tujuan dari pembangunan yang akan dilaksanakan dan mereka juga masih sering mempertanyakan hasil yang mereka dapat dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Sehingga diperlukan usaha yang lebih mendalam di dalam memberikan penjelasan tersebut kepada seluruh warga masyarakat.

Di lain pihak, Kepala Desa juga dihadapkan pada hambatan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, karena sering kali setiap ada kegiatan pembangunan atau kerja bakti di desa mereka akan enggan untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar, karena mereka merasa malu atau gengsi untuk melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan pendidikan yang dimilikinya sudah tinggi sehingga tidak pantas untuk melakukannya, mereka biasanya cenderung lebih suka untuk memberikan saran ataupun kritik saja tanpa ikut serta secara langsung dalam kegiatan pembangunan, padahal partisipasi mereka dalam swadaya tenaga juga diperlukan.

Bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, sudah seharusnya Kepala Desa bertanggung jawab di dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan masyarakatnya, misalkan saja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa, ataupun membuka kursus-kursus keterampilan atau setidaknya

mengupayakan agar sebagian masyarakatnya bisa bebas dari buta huruf. Dengan begitu masyarakat akan lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan, karena seperti yang telah diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan di Desa Bareng salah satunya yaitu kurangnya/minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan juga tidak adanya tempat-tempat kursus keterampilan yang tersedia di Desa Bareng.

Dan diharapkan agar warga masyarakat saling melengkapi, maksudnya disini ialah untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan agar dapat membantu upaya Kepala Desa di dalam menyampaikan informasi tentang program-program pembangunan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, karena mereka lebih cepat mengerti dan memahami tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi yang enggan melakukan pekerjaan kasar, diperlukan pendekatan oleh Kepala Desa kepada mereka dengan memberikan pengertian dan arahan bagaimana pentingnya partisipasi tenaga mereka dalam kegiatan pembangunan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah dalam membangun desa, hal ini dilakukan agar masyarakat yang berpendidikan tinggi menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa demi terwujudnya tujuan bersama masyarakat untuk kemajuan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil intepretasi data bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa yang merupakan administrator pemerintah, administrator kemasyarakatan dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana, dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan bantuan ini dapat membantu terlaksananya pembangunan desa dalam hal pembiayaan atau pembangunan.
3. Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang. Seperti yang ada di Desa Bareng dimana tingkat pendapatan masyarakatnya masih sangat rendah, hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yang mereka berikan dalam bentuk swadaya uang, yang mana tingkat partisipasinya masih rendah atau kurang.

4. Pendidikan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat membantu memudahkan upaya Kepala Desa dalam menyampaikan informasi tentang program pembangunan, dan di sisi lain masyarakat berpendidikan rendah sangatlah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam hal partisipasi dalam bentuk tenaga.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan dan juga data-data yang telah diperoleh, yang mungkin bermanfaat bagi Kepala Desa sebagai bahan masukan, diantaranya sebagai berikut:

Seorang Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa hendaknya mampu memberikan penjelasan yang sedalam-dalamnya tentang program pembangunan maupun partisipasi mereka dalam pembangunan tersebut, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari pembangunan tersebut, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu seharusnya penyampaian dan komunikasi pembangunan selain dilakukan dengan para wakil masyarakat juga dilakukan kepada masyarakat secara langsung sebagai pelaksana dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat akan merasa ikut terlibat langsung dan berkepentingan dalam pembangunan desanya.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang hendaknya selain digunakan untuk pembangunan juga dapat dijadikan sebagai stimulan yang mampu mendorong dan merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan bukan sebaliknya dengan adanya bantuan tersebut dijadikan ketergantungan oleh masyarakat akan dana pembiayaan pembangunan,

karena sifat dari bantuan ini hanya membantu dan mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan pembangunan, sedangkan tanggung jawab penuh terlaksananya pembangunan berada di tangan masyarakat secara keseluruhan dan juga Kepala Desa.

Kepala Desa Bareng diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya yang masih rendah, Peningkatan pendapatan masyarakat bisa saja dilakukan misalkan saja dengan membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat dengan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten, seperti membuka industri kecil kerajinan, industri kecil makanan ringan, koperasi bersama dan kegiatan ekonomi yang lain agar dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena dengan tingkat pendapatan yang masih rendah memberikan dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya

Untuk meningkatkan pemahaman dan ketanggapan masyarakat akan informasi dan program-program pembangunan desa, hendaknya Kepala Desa Bareng mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, karena sampai saat ini tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakatnya masih sangat rendah. Karena dengan tingkat pendidikan yang baik maka akan memudahkan upaya Kepala Desa di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan masyarakat sehingga dengan pengetahuan dan kecerdasan yang mereka miliki mampu untuk menerima, memahami dan menterjemahkan setiap informasi dan program pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Desanya. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Bareng, karena seperti yang diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Bareng masih sangat minim. Di samping itu juga diperlukan adanya arahan dan penjelasan kepada

masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan untuk kepentingan mereka dan ini merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desanya dan dibutuhkan juga dukungan oleh semua pihak. Mengenai pendidikan, perhatiannya tidak saja harus diberikan mengenai pendidikan formil. Untuk kepentingan partisipasi masyarakat, maka pengembangan pendidikan non formil juga perlu diberikan perhatian, hal ini dapat dilakukan dengan membuka program-program yang bersifat mendidik, misalnya penyelenggaraan perpustakaan dan bacaan umum dengan tujuan agar masyarakat setidaknya dapat terbebas dari buta huruf.

